ANALISA PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus SAMSAT Kota Semarang III)

Guna memenuhi Tugas Akhir Skripsi

untuk memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S-1)

Ekonomi Islam

Oleh :

Muhammad Faishal Maula

1505026096

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2020

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185
website : febi. Walisongo.ac.id – Email febi @ walisongo.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks
Hal : Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skrip si saudara:

Nama : Muhammad Faishal Maula
NIM : 1505026096
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Semarang III

Dengan ini telah kami setujui dan mohon agar segera diujikan.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 19 Juni 2020

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Heny Yuningrum, SE, M.Si	**Desy Noor Farida, SE, M.Si, AK CA**
NIP. 19810609 200710 2005	**NIP. 19791222 21503 2 004**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185
website : febi. Walisongo.ac.id – Email febi @ walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Nama	: Muhammad Faishal Maula
NIM	: 1505026096
Fakultas/Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Islam
Judul Skripsi	: **Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di SAMSAT Kota Semarang III.**

Telah di Munaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal : 19 Juni 2020

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar sarjana (Strata Satu/S1) dalam Ilmu Ekonomi Islam Semarang.

Semarang, 19 Juni 2020

Ketua Sidang,

Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag
NIP. 19730811 200003 1 004

Sekretaris Sidang,

Heny Yuningrum, SE., M.Si
NIP. 19810609 200710 2005

Penguji I,

Rahman El Junusi, SE., MM
NIP. 19691118 200003 1002

Penguji II,

Mohammad Nadzir, SHI., MSI
NIP. 19730923 200312 1002

Pembimbing I,

Heny Yuningrum, SE., M.Si
NIP. 19810609 200710 2005

Pembimbing II,

Dessy Noor Faridda, SE, M.Si, AK CA
NIP. 19791222 201503 2 001

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Prof. Dr. Hamka Kampus III NgaliyanTelp/Fax. (024) 7601291
Semarang 50185

Hal : **Nilai Bimbingan Skripsi**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa setelah kami selesai membimbing skripsi, saudari:

Nama : Muhammad Faishal Maula

Nim : 150526096

Jurusan : Ekonomi Islam

Judul Skripsi :**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus di SAMSAT III Kota Semarang)**

Maka nilai skripsinya adalah :...

Demikian agar digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 19 Mei 2020

Pembimbing I

Heny Yuningrum, SE.,M.Si

NIP. 19810609 200710 2 005

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Prof. Dr. Hamka Kampus III NgaliyanTelp/Fax. (024) 7601291
Semarang 50185

Hal : **Nilai Bimbingan Skripsi**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa setelah kami selesai membimbing skripsi, saudari:

Nama : Muhammad Faishal Maula

Nim : 150526096

Jurusan : Ekonomi Islam

Judul Skripsi :**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus di SAMSAT III Kota Semarang)**

Maka nilai skripsinya adalah :...80.....

Demikian agar digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 19 Mei 2020

Pembimbing I

Desy Nor Farida, SE.,M.si,AK,CA.

NIP. 19810609 200710 2 005

MOTTO

لاَ تَكُنْ رَطْباً فَتُعْصَرَ وَلاَ يَابِسًا فَتُكَسَّرَ

Janganlah engkau bersikap lemah sehingga engkau akan diperas, dan janganlah engkau bersikap keras sehinga egkau akan dipatahkan. (seimbanglah dalam segala urusan).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. yang selalu diharapkan syafa'atnya baik di dunia maupun di akhirat. Dengan rasa bahagia saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Ibunda Nurul Fathkiyah, seorang wanita terhebat yang selalu memberikan kasih sayang dan doa yang tiada henti. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, perlindungan, kasih sayang serta memberikannya kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.
2. Ayahanda Suyanto, yang telah mendidik penulis untuk menjadi seorang yang mandiri dan bermanfaat. Skripsi ini juga menjadi salah satu bukti saya yaitu menjadi anak yang bisa menjadi lebih baik lagi. Semoga Allah SWT selalu memberikan ampunan dan kasih sayang dialam sana, serta diberikan rumah yang lebih baik dari rumahnya.
3. Kedua saudaraku Muhammad Ni'amul Ulum dan Amelia Fathkiyatus Safira. Yang selalu memberikan semangat untuk mengejar cita-cita.
4. Teman hidupku rizka indah fitria yang telah menemani selama skripsi dan enggak ada lelahnya dalam mengingatkanku untuk ngerjain skripsi.
5. Teman teman futsal di uin walisongo yang selalu member hiburan ketika jenuh mengerjakan skripsi.
6. Semua teman-teman organisasi yang secara tidak langsung telah mendidik saya menjadi pribadi yang lebih baik.
7. Semua sahabat-sahabatku kontrakan yang tak akan pernah terlupakan yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.

TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan

ء = '	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

◌َ = a

◌ِ = i

ُ = u

C. Diftong

أَيْ = ay

أَوْ = aw

D. Syaddah

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطبُ *al-thibb.*

E. Kata Sandang (...ال)

Kata sandang (...ال) ditulis dengan *al-*... misalnya الصناعة = *al-shina'ah. Al-*ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta'Marbuthah

Setiap *ta'marbuthah* ditulis dengan "h" misalnya الطبيعية المعيشة =*al-ma'isyah al-thabi'iyyah.*

ABSTRAK

Pajak kendaraan bermotor adalah bagian pajak daerah yang termasuk kedalam jenis pajak provinsi, objek dari pajak kendaraan bermotor adalah penguasaan kendaraan dan kepemilikan kendaraan. Tahap awal pembayaran pajak kendaraan yaitu atas landasan kepatuhan. faktor-faktor yang membuat wajib pajak atau pemilik kendaraan bermotor yang patuh dalam membayar pajak dapat dilihat dari kesadaran wajib pajak maupun tegas enggaknya sanksi pajak bagi pelanggarnya, dan didukung dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Ketiga faktor yang disebutkan tersebut menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini. Penelitian ini mendasarkan pada research gap. Dengan perumusan masalah seberapa besar pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di SAMSAT Kota Semarang III?

Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Dengan Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari kuesioner yang diberikan kepada nasabah wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT kota Semarang III sebanyak 100 responden,dan didukung pula dengan data sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan uji instrumen pertanyaan dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis dengan menggunakan uji t, uji f dan koefisien determinasi (R^2),dengan olah data menggunakan SPSS 26.0.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai t *hitung* masing-masing variabel bebas adalah 9,914 untuk kesadaran wajib pajak, 0,260 untuk sanksi pajak, dan 3,079 untuk modernisasi sistem administrasi perpajakan. Sedangkan nilai t *tabel* adalah 1,66023 (t *hitung*>t *tabel*) artinya bahwa variabel kesadaran wajib pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan tergadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh siginfikan dan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan dari hasil analisis koefisien determinasi diperoleh nilai sebesar 0,785 atau 79%, yang artinya pengaruh variabel independen (kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, modernisasi sistem adinistrasi perpajakan) terhadap variabel dependen (kepatuhan)

sebesar 0,785, ini menunjukkan bahwa kontribusi variabel-variabel independen adalah sebesar 79%, sedangkan sisanya, dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
Kata kunci: kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan

ABSTRACT

Motor vehicle tax is a part of local tax that is included in the provincial tax type, the object of motor vehicle tax is vehicle control and vehicle ownership. The initial stage of payment of vehicle tax is on the basis of compliance. Factors that make taxpayers or motorized vehicle owners who are obedient in paying taxes can be seen from taxpayer awareness or strict tax sanctions for violators, and supported by the modernization of the tax administration system. These three factors mentioned are the problem formulations in this study. This research is based on the research gap. With the formulation of the problem how much influence the awareness of taxpayers, tax sanctions and tax administration systems on tax compliance in SAMSAT Semarang III?

This research is a research using quantitative approach method. With the data source in this study using primary data derived from questionnaires given to motor vehicle taxpayers in SAMSAT Semarang III as many as 100 respondents,and also supported by secondary data. This study aims to determine how much influence the awareness of taxpayers, tax sanctions, and the modernization of the tax administration system on motor vehicle taxpayer compliance. The analytical method used in this study is to use the question instrument test using the validity and reliability test, the classic assumption test, multiple linear regression analysis and hypothesis testing using t test, f test and coefficient of determination (R2), with data processing using SPSS 26.0 .

Based on the results of the study showed that the calculated value of each independent variable was 9,914 for taxpayer awareness, 0.260 for tax penalties, and 3.079 for the modernization of the tax administration system. While the value of t table is 1.66023 (t count> t table) means that the variable awareness of taxpayers and modernization

of the tax administration system has a positive and significant effect on taxpayer compliance, while tax sanctions have no significant and negative effect on tax compliance. While the results of the analysis of the coefficient of determination obtained a value of 0.785 or 79%, which means the influence of independent variables (taxpayer awareness, tax sanctions, modernization of the tax administration system) to the dependent variable (compliance) of 0.785, this shows that the contribution of independent variables is by 79%, while the rest is explained by other factors not examined in this study.

Keywords: awareness of taxpayers, tax sanctions, modernization of the tax administration system

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang menguasai seluruh alam, tidak ada daya upaya maupun kekuatan kecuali hanya dari-Nya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada

junjungan kita Baginda Rasul Muhammad SAW serta kepada para keluarganya yang suci, sahabat-sahabat serta para pengikutnya yang sholih.

Skripsi ini disusun dalam rangka untuk melengkapi salah satu syarat guna menyelesaikan program studi Strata 1 Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kesalahan-kesalahan, untuk itu segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun sangat penulis perlukan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Pelaksanaan dan penulisan skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., sebagai Rektor dan dengan para jajaran Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Muhammad Syaifullah, M.Ag., sebagai Dekan dan dengan jajaran para Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag., sebagai Ketua Jurusan dan Nurudin, SE., MM., sebagai Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Heny Yuningrum, SE., M.Si., dan Desy Nor Farida, SE.,Msi,AK,CA., yang menjadi dosen pembimbing I dn II yang dengan sabar dan ikhlas membimbing serta mengarahkan saya untuk menyelesaikan skripsi saya.

5. Seluruh dosen jurusan ekonomi islam, seluruh dosen pengampu di fakultas ekonomi dan bisnis islam, seluruh tenaga pegawai yagada di fakultas ekonomi dan bisnis islam saya ucapkan terima kash atas semua ilmu yang diberikan selamakuliahdi universitas islam negeri walisongo.

Atas bimbingan, bantuan, dan arahan dari semua pihak dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga semua amal kebaikan yang telah dilakukan selalu mendapat pahala dari Allah SWT. Dan dengan kerendahan hati pasti masih banyak kekurangan dari skripsi saya. Kritik dan saran yang saya terima pasti akan bermanfaat buat penulisan skripsi saya.

Semarang, 19 September 2019

MUHAMMAD FAISHAL MAULA
1505026096

DAFTAR ISI

Halaman Judul **1**
Pengesahan ..... Error! Bookmark not defined.
MOTTO ..... **ii**
PERSEMBAHAN ..... **v**
Deklarasi ..... Error! Bookmark not defined.
TRANSLITERASI ..... **vii**
Abstrak ..... **ix**

Kata Pengantar ..... **xi**

Daftar Isi ..... **xiii**

Daftar Tabel ..... **xvii**

Daftar Gambar ..... **xviii**

Bab I Pendahuluan **1**

1.1 Latar Belakang **1**

1.2 Rumusan Masalah **12**

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian **12**

1.4 Sistematika Penulisan **14**

Bab II Tinjauan Pustaka **16**

2.1 Landasan Teori **16**

2.1.1 Pajak **16**

2.2 PenelitianTerdahulu **27**

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritik **31**

2.4 Hipotesis Penelitian **31**

BAB III Metode Penelitian **38**

3.1 Jenis dan Sumber Data Penelitian **38**

3.2 Lokasi Penelitian **39**

3.3 Populasi dan Sampel **39**

3.4 Metode Pengumpulan Data **41**

3.5 Variabel Penelitian dan Pengukuran **42**

3.6 Teknik Pengujian Instrumen Penelitian **45**

3.6.1 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas **46**

3.6.2 Uji Asumsi Klasik **47**

3.6.3 Analisis Regresi Berganda 49
3.6.4 Pengujian Hipotesis 49
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 53
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 53
4.2 Deskriptif Data Penelitian dan Karakteristik Responden 60
4.3 Uji Instrumen 77
4.4 Uji Asumsi Klasik 80
4.5 Uji Analisis Regresi Linier Berganda 87
4.6 Uji Hipotesis 90
4.7 Pembahasan Hasil Analisis Data Penelitian 94
BAB V PENUTUP 102
5.1 Kesimpulan 102
5.2 Saran 103
5.3 Keterbatasan Penelitian 103
5.4 Agenda Penelitian Yang Akan Datang 104
DAFTAR PUSTAKA 107
LAMPIRAN ..... Error! Bookmark not defined.
DAFTAR RIWAYAT HIDUP MAHASISWA 145

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 34
Tabel 3.1 Variabel Independen 45
Tabel 3.2 Variabel Dependen 46
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin . 81
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 81
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Profesi 82
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Agama 84
Tabel 4.5 Skor Kuesioner Variabel X_1 85
Tabel 4.6 Skor Kuesioner Variabel X_2 88
Tabel 4.7 Skor Kuesioner Variabel X_3 91
Tabel 4.8 Skor Kuesioner Variabel Y 93
Tabel 4.9 Analisis Statistik Deskriptif 96
Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas 99
Tabel 4.11 Hasil Uji Reliabilitas 101
Tabel 4.12 Hasil Uji Normalitas 102
Tabel 4.13 Hasil Uji Multikolonieritas 104
Tabel 4.14 Hasil Uji Statistik Gletser 106
Tabel 4.15 Hasil Uji Analisis Regresi 107
Tabel 4.16 Hasil Uji Pengaruh Parsial (uji t) 109
Tabel 4.17 Hasil Uji Simultan (uji f) 111
Tabel 4.18 Hasil Uji Koefisien (uji R^2) 113

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritik 37
Gambar 4.1 Peta lokasi gunungpati 61
Gambar 4.2 Struktur Organisasi 63
Gambar 4.3 Grafik Normal *Probability Plot* Uji Normalitas *103*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah salah satu bangsa yang sedang berkembang dengan memperbanyak pelaksanaan pembagunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Upaya yang dilakukan pemeritah yaitu dengan menggali sumber dana berupa pajak. Pajak merupakan pungutan dari masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang yang bersifat dipaksakan dan terutang, yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan. selain itu, pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan[1] dan untuk mengatasi masalah yang ada yaitu masalah sosial, kesejahteraan, kemakmuran serta dapat dijadikan kontrak sosial antara warga negara dengan pemerintah.

Pada pemerintahan Islam periode awal di Madinah pendapatan Negara bersumber dari orang kafir (Ghanimah, Fa'i, Kharaj, Jizyah, 'Ushr) dan juga dari kaum Muslimin yaitu Zakat. Namun seiring dengan ekspansi wilayah kekuasaan Negara Islam

[1]Thomas Sumarsan, *Perpajakan Indonesia, (*Jakarta:PT.Indeks, 2010), hlm.10

yang mengakibatkan banyak orang kafir masuk Islam, sehingga dari mereka (orang kafir) tidak dapat lagi diperoleh Ghanimah, Fa'i, Kharaj, Jizyah dan 'Ushr. Padahal dari sumber-sumber inilah dibiayai berbagai pengeluaran umum Negara seperti menggaji tentara dan aparat, membangun fasilitas serta berbagai pengeluaran umum. Akibat tidak adanya sumber-sumber pendapatan negara seperti yang di contohkan oleh Rasulullah SAW dan para Shahabat berupa Ghanimah, Fa'i, Kharaj, Jizyah dan 'Ushr di zaman sekarang, maka muncul pemikiran baru (Ijtihad) dari para ulama yang kemudian di sahkan oleh Ulil Amri sebagai sumber pendapatan baru. Salah satu hasil Ijtihad itu adalah Pajak (Dharibah). Hadits Nabi SAW tentang wajibnya kaum Muslimin untuk mencukupi kebutuhan pokok mereka yang berbunyi:

عن سلمة بن عبد ا لله بن مجضن الخطمى ' عن أ بيه و كا نت له صحبة , قال : قال رسول الله صلى ا لله عليه و سلم. من ا صبح منكم أمنا فى سربه معاف فى جسد ه عند ه قوت يومه فكأنها حيذت له الد نيا. ,

Artinya : "Diriwayatkan dari Salamah bin Abdullah bin Mahdhan Al Khathami, dari ayahnya, bahwa ia mempunyai hubungan dekat, bahwa Rasulullah SAW Bersabda:"Barang siapa diantaramu yang bangun di pagi hari dalam kegembiraan, sehat

badan, dan mempunyai bahan makanan pada hari itu, maka ia seolah-olah diberikan seluruh dunia ini.". (HR Tirmidzi).[2]

Pemerintah bertekad untuk melepaskan ketergantungan pada bantuan luar negeri dan beralih pada kemampuan bangsa sendiri melalui peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Pajak merupakan sektor yang sangat mempengaruhi penerimaan negara. Pajak memiliki fungsi budgetair, yaitu pajak sebagai sumber penghasilan negara yang kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, seperti kepentingan pembangunan nasional maupun pelayanan untuk masyarakat. Dalam informasi APBN 2019, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp 2.165,1 triliun, sedangkan penerimaan pajak ditargetkansebesar Rp 1.786,4 triliun. Dengan kata lain, penerimaan pajak ditargetkan akan menyumbang 82,5% dari total pendapatan negara. Penerimaan pajak menjadi sumber utama belanja negara karena kontribusinya yang besar terhadap pendapatan negara. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memaksimalkan setiap pos penerimaan negara, termasuk pajak. Target penerimaan pajak setiap tahunnya meningkat sesuai dengan meningkatnya kebutuhan pembiayaan pengeluaran negara. Realisasi penerimaan pajak yang meningkat tentu akan memudahkan pelaksanaan pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat

[2]Gus Fahmi, "Halal Haram Pajak", https://www.pajak.go.id/artikel/pajak-haramkah, 11 Februari 2020, 23:54.

yang dibiayai oleh pendapatan negara. Dengan meningkatnya penerimaan pajak, maka akan meningkatkan pembangunan dan memudahkan pembiayaan untuk pos-pos yang telah diproyeksikan dalam APBN.[3]

Pajak kendaraan bermotor atau PKB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Melalui hasil wawancara Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Jawa Tengah, mengungkapkan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Semarang terbilang rendah, dimana kurang dari 5%, padahal di daerah lainnya berkisar lebih dari 10%. Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada tahun 2020 masih tinggi, khususnya di UPPD Kota Semarang III, atau wilayah barat seperti Semarang Barat, Tugu, Ngaliyan, Mijen, dan Gunungpati. Untuk wilayah ini tunggakan mencapai Rp 12.004.173.325 dengan jumlah kendaraan mencapai 100.642 unit.

Dalam penelitian ini, dapat diketahui banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor di Kota Semarang khususnya di Semarang III / Semarang Barat yang belum pasti meningkatkan pendapatan daerah apabila tidak didukung dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak. Penelitian ini akan

[3]Viva A.A, dkk. "*Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesdaran Wajib Pajak Dan Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Minahasa Selatan".* Jurnal EMBA vol 8. No 3. 2019, hlm 4251-4260

mengkaji seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Semarang III atau wilayah Semarang Barat. Dalam hal meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor maka diperlukannya kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, Modernisasi Administrasi Perpajakan.

Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan untuk meningkatkan kemauan membayar pajak.[4] Jika jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatkan dan tidak diimbangi dengan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, maka hal ini dapat menyebabkan tunggakan dan denda yang cukup besar pada UPPD Kota Semarang III atau wilayah Semarang Barat.

Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi pajak bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih merugikannya.[5] sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan ditaati, dipatuhi atau bisa dikatakan juga sanksi perpajakan merupakan alat

---

[4]Pancawati Hardiningsih,"*Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*", Dinamika Keuangan Dan Perbankan, vol.3 No.1, 2011, Hal: 126-142.

[5]Agus Nugroho Jatmiko,"*Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Wajb Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)",(*Semarang:Universitas Diponegoro,2006).

(preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.[6]wajib pajak akan dikenakan sanksi pajak saat tidak melaksanakan kwajibannya membayar pajak. Wajib pajak akan patuh karena adanya sanksi berat akibat tindakan kejahatan dalam penyelundupan pajak.[7]

Pengelolaan dan penyederhanaan sistem administrasi perpajakan akan memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan sistem administrasi yang baik, diharapkan pemerintah mampu mengoptimalkan realisasi penerimaan dan meningkatkan kepatuhan pajak. Modernisasi sistem adminitrasi perpajakan yang efisien akan memudahkan wajib pajak untuk memahaminya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.[8]

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kedisiplinan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dibidang perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Menurut hasil wawancara dengan kepala bagian pajak kendaran bermotor Bapak Machfudh Amin, SE, MM, pada hari kamis 6 Februari 2020 pukul 10.52 WIB menjelaskan bahwa kesadaran di kota-kota besar sudah lebih baik daripada di daerah-daerah,

---

[6]Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, (Yogyakarta: CV Andi Offet, 2011), 59.

[7]Devano dan Rahayu, *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. (Jakarta: Kencana, 2006), 112.

[8]Viva A.A, LintjeKalangi, Steven J.Tangkuman. "*Pengaruh Pengetahuan Wajib…"*. Jurnal EMBA vol 8. No 3. 2019, hlm. 4251-4260.

kebanyakan kesadaran membayar pajak masih rendah karena alasan perekonomian meskipun sebenarnya untuk membayar pajak yang hanya sekitar Rp300.000 tetapi masih ada kebutuhan lain yang lebih penting seperti biaya sekolah anak, biaya kehidupan sehari hari, biaya rumah sakit dan lain-lain sehingga masih menganggap sepele dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor. Sedangkan di kota-kota besar itu lebih banyak penunggakan yang dilakukan oleh perusahaan karena kendaraannya jarang dipakai dan masih bia berkelit dalam mebayar pajak. Para wajib pajak di wilayah semarang III kesadaraanya dalam membayar pajak juga masih rendah karena tingkat nasionalisme yang masih kurang, padahal manfaat dari membayar pajak kendaraan bermontor adalah untuk negaranya sendiri seperti pembangunan insfrastuktur jalan maupun pembangunan-pembangunan lainnya, yang sebenernya digunakan masyarakat sendiri dalam kehidupan sehari hari.

Kepatuhan wajib pajak yang masih rendah juga dipengaruhi oleh sanksi pajak yang masih belum bisa membuat pelanggarnya jera yang masih bersifat preventif seperti hanya berupa surat teguran dan hanya sekedar denda itupun kalo wajib pajak datang ke SAMSAT untuk mengurus perpanjangan pajak baru mendapat denda kalo tidak ke kantor SAMSAT juga tidak akan mendapat denda, Langkah-langkah yang sudah dilakukan seperti door to door dengan mendatangi tiap rumah penunggak pajak memberi surat teguran, termasuk kerjasama dengan kejaksaan tinggi dan operasi yang dilakukan pihak kepolisian juga belum maksimal. Seharusnya sanksi

bisa dilakukan dengan menyita STNK nya, menggembok kendaraan telat pajak seperti pelanggar tempat parkir ataupun dengan memasang alat GPS di setiap kendaraan sehingga dapat diketahui keberadaan kendaraan yang menunggak pajak. Sanksi pajak yang masih belum tegas yang membuat penunggak pajak tidak takut ntuk mrlanggarnya.

Modernisasi sistem administrasi yang sudah ada di SAMSAT Semarang III yaitu adanya aplikasi SAKPOLE E-Samsat Jawa Tengah adalah aplikasi untuk membayar pajak kendaraan secara online dengan cara mengunduh aplikasi di google playstore, melakukan pendaftaran dengn nomer polisi dan NIK, setalah melakukan pendaftaran dan verifikasi kendaraan adalah dengan melakukan pembayaran di ATM , langkah selanjutanya setelah melakukan pembayaran adalah mencetak surat keterangan pajak daerah (SKPD) dan menyerahkannya ke kantor SAMSAT semarang III. Meskipun sudah ada cara pembayaran pajak kendaraan melalui online tapi masih banyak wajib pajak yang menganggap cara tersebut masih rumit dan lama karena masih harus tetap datang ke kantor SAMSAT, sehingga banyak wajib pajak yang malas membayar pajak kareana belum mudahnya dalam mengurusi administrasi membayar pajak. Berikut ini data tunggakan pajak kendaraan bermotor di wilayah SAMSAT Semarang III :

Tabel 1.1

Data tunggakan di SAMSAT Semarang III

Per kecamatan tahun 2018/2019 per 22 Januari 2020

NO	KECAMATAN	RODA4		RODA 2		JUMLAH	
		OBYEK	PKB	OBYEK	PKB	OBYEK	PKB
1	SEMARANG BARAT	5.910	7.872.092.325	40.012	4.486.644.025	45.922	12.358.736.350
2	TUGU	1.074	1.496.861.900	6.692	814.214.200	7.766	2.311.076.100
3	NGALIYAN	4.328	5.966.549.600	29.362	3.550.443.350	33.690	9.516.992.950
4	MIJEN	1.190	1.668.094.300	11.674	1.513.927.250	12.864	3.202.021.550
5	GUNUNGPATI	1.510	1.911.354.075	12.902	1.638.944.500	14.412	3.550.298.575
JUMLAH		14.012	18.934.952.200	100.642	12.004.173.325	114.654	30.939.125.525

Sumber : Kantor SAMSAT Semarang III

Data tunggakan pajak kendaraan diatas masih bersifat kesuluruhan dari 2018 sampai 2020. Dan berikut ini data dari tiga bulan terakhir yaitu bulan desember, januari, februari untuk mengetahui naik turunnya tunggakan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Semarang III :

Tabel 1.2

Data tunggakan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Semarang III selama bulan Desember 2019, Januari dan Februari 2020

BULAN	RODA 4		RODA 2	
	OBYEK	PKB	OBYEK	PKB
DESEMBER	634	1.201.620.375	3.341	488.842.500
JANUARI	573	1.156.698.400	3.915	626.817.000
FEBRUARI	622	1.295.209.000	3.959	640.661.125
JUMLAH	1.191	3.653.527.775	11.215	1.756.320.625

Sumber : Kantor SAMSAT Semarang III

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa semenjak bulan desember tahun 2019 sampai bulan februari 2020 selalu meningkat jumlah tunggakannya, dan hal tersebut masih menjadi masalah yang seharusnya bisa menjadi potensi bagi Negara yang bisa digunakan untuk pembangunan dan peningkatan ekonomi di Indonesia.

Hasil penelitian terdahulu yang mengenai kesadaran wajib pajak yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di dukung oleh Randy Ilhansyah, Maria G Wi Endang, dan Rizky Yudi Dhewantara dengan hasil penelitian bahwa variabel kesadaran wajib pajak yang paling dominan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Kendaraan Bermotor di KB Samsat Kota Malang. Variabel tersebut menjadi dominan karena wajib pajak merasa bahwa kewajiban perpajakan harus dipahami dan

dilakukan secara benar dan sukarela karena fungsi dari membayar pajak itu merupakan sebagai pembiayaan negara.[9]

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Choirul Anam, Rita Andhini, dan Hartono menganai sanksi pajak berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh tidak langsung terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi sanksi yang di berikan tidak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan seorang Wajib Pajak.[10]

Selain kesadaran wajib pajak dan sanki pajak yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, ada juga modernisasi sistem administrasi perpajakan yang bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak , berdasarakan penelitian yang dilakukan oleh Pradipta Anisa Virgiawati, Samin, dan Dwi Jaya Kirana menunjukkan hasil modernisasi sistem administrasi perpajakan mempunyai pengaruh yang sigifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Ketersediaan inovasi Samsat yang beragam dan sesuai

---

[9]Randy Ilhamsyah, dkk, *Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WajibPajak Kendaraan Bermotor(Studi SAMSAT Kota Malang),* Jurnal Perpajakan JEJAK Vol.8, No.1, 2016, hlm. 9

[10]Muhammad Choirul Anam, dkk, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayana Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas Sebagai Variabel Intervening (Studi di KPP Pratama Salatiga),*Journal Of Acounting.

dengan kebutuhan wajib pajak seperti aksesibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keakuratan informasi mampu menciptakan wajib pajak yang patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.[11]

Dari latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti apakah ada **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus SAMSAT Kota Semarang III**).

1.2 Rumusan Masalah

Inti masalah dari penelitian ini ditunjukkan dengan berbagai pertanyaan dibawah ini:

a. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
b. Apakah pengaruh sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
c. Apakah pengaruh modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

[11]Pradipta Anisa Virgiawati, Samin, dan Dwi Jaya Kirana,"*Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor(Studi Pada Wajib Pajak di Jakarta Selatan)*", Jurnal MONEX Vol.8 No.2,2019.

Dari rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Agar dapat menguji secara empiris pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Agar dapat menguji secara empiris pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Agar dapat menguji secara empiris pengaruh modernisasi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Bagi Penelitan

   Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengalaman baru tentang kondisi yang sebenarnya yang ada di dunia nyata dan diharapkan dapat memberikan bukti empiris dan untuk mengembangkan ilmu ekonomi islam mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Kegunaan Bagi Instansi Terkait

   Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi SAMSAT Semarang III dalam pemecahan masalah mengenai

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang dilakukan dengan melihat kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan modernisasi administrasi perpajakan.

3. Kegunaan Bagi Institusi Pendidikan

   Dapat menjadi literatur dan pegembangan ilmu yang terkait dengan kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, modernisasi administrasi pajak terhadap kesadaran membayar pajak kendaraan bermotor.

1.4 Sistematika Penulisan

Tata cara pembahasan ini bertujuan agar dapat menunjjukkan alur penulis dari awal sampai akhir peneliian. berikut rencana sistematika pembahasan:

BAB I : PENDAHULUAN.

Bab ini akan menjelaskan dari tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, sampai sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menjelaskan deskripsi teori tentang pengertian pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, modernisasi administrasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran teoritik serta hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjabarkan jenis dan sumber data, populasi sampel, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran, dan teknik analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan tentang penjelasan objek penelitian, proses pengolahan analisis data, dan pembahasan dari hasil pengolahan data.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi penutup, saran-saran ,dan kesimpulan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan sejumlah uang yang dibayarkanke negara yang didasari peratuan perundang-undangan dan manfaat dari pembayaran tersebut dapat dirasakan timbal balik baga kepentingan bersama. Menurut lembaga pemungutannya pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah.[12]

Dengan peraturan daerah, yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya nanti digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.[13]

2.1.1.2 Pajak Dalam Perspektif Islam

[12]Viva A.A, LintjeKalangi, Steven J.Tangkuman. "*Pengaruh Pengetahuan Wajib… ".* Jurnal EMBA vol 8. No 3. 2019, hlm. 4251-4260 .

[13]Marihat Pahala Siahaan. *Edisi Revisi Pajak Daerah & Retribusi Daerah (Jakarta: Raja Grafinda Persada,2013).*

Sistem perpajakan menurut Islam adalah sistem perpajakan yang diterapkan saat pemerintahan Rasulullah sampai dengan pemerintahan Khulafaurrasyidin. Pada zaman tersebut, anggaran negara masih sangat sederhana dan tidak serumit sistem anggaran modern. Negara memakai prinsip anggaran berimbang (*balance budget*). Pendapatan negara yang didapat sangat berbeda setiap tahunnya, bahkan dari hari ke hari. Berbagai bagian Negara (provinsi) mengirimkan sejumlah tertentu dari kelebihan penghasilannya sesudah mereka membayar berbagai pengeluaran administratif dan pengeluaran mereka lainnya. Jadi baitul mal tidak menerima pendapatan kotor dan pajak dari provinsi-provinsi tersebut, tetapi hanya surplus yang tersisa setelah semua jasa setempat dan pembayaran kemiliteran dikurangi. Dasar prinsip anggaran berimbang yang diterapkan pada masa awal periode Islam adalah berapa penghasilan yang diterima untuk menentukan jumlah yang tersedia untuk dibelanjakan, kecuali dalam keadaan darurat karena perang atau bencana alam lainnya, yang mengharuskan pungutan khusus atau sumbangan.

Jadi yang perlu direstrukturisasi dalam sistem perpajakan di Indonesia antara lain:

1) PPh; zakat seharusnya mengurangkan jumlah pajak terutang bukan jumlah pendapatan kena pajak, karena zakat yang hanya mengurang pendapatan kena pajak yang menyebabkan jumlah pendapatan setelah pajak lebih kecil disbanding kaum non muslim yang mempunyai tingkat pendapatan awal sama.

b) PPN; jika dikaji ulang PPN sulit membedakan antara orang kaya dan miskin, jadi jika dikenakan pada orang miskin hal itu akan menjadi haram. Jadi seharusnya PPN hanya diperuntukkan untuk bahan yang merupakan kebutuhan sekunder dan tersier, sedang untuk kebutuhan primer seperti sandang, pangan dan papan tidak boleh dikenakan PPN bagaimanapun jenisnya. Karena jika masyarakat miskin membeli kebutuhan primer yang terkena pajak, pemerintah dan pihak terkait telah menzhalimi mereka, apalagi ketika harga barang primer tersebut semakin melambung karena pajak sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhannya.

c) PBB; tidak boleh dipungut dari masyarakat miskin. Karena pajak ini dipungut dari objek bangunan dan tanah yang diambil manfaatnya. Pemerintah dan pihak terkait harus membuat batasan bangunan dan tanah yang bagaimana yang tidak boleh dikenakan pajak dan golongan masyarakat mana yang tidak boleh dipungut PBB. Karena saat ini masyarakat miskin masih banyak yang dikenakan PBB meskipun telah ada ketentuan bahwa mereka dapat bebas PBB jika pendapatan mereka dibawah PTKP.

Jadi dari berbagai sumber pendapatan tersebut hanya digunakan untuk sesuatu yang sifatya wajib, bukan untul hal-hal atau kegiatan yang bersifat subhat maupun haram.[14]

Dalam menentukan hukum atas suatu hal yang berhubungan masyarakat seperti pajak, dalam syariat Islam salah satunya berdasarkan kepada kemaslahatan umum. Salah satu kaidah ushul fiqhi menyatakan kemaslahatan yang umum lebih diprioritaskan atas kemaslahatan yang khusus. Dasar itulah yang dapat dijadikan rujukan pemungutan pajak seperti yang difatwakan oleh tokoh-tokoh dari mahzab Maliki. Al-Maslahah Mursalah merupakan dalil-dalil khusus berupa nash-nash syara yang tidak menunjukkan diakui atau tidaknya suatu keabsahan, melainkan dalil-dalil umumlah yang menunjukkan bahwa syari'at memelihara berbagai kemaslahatan makhluk dan bertujuan mewujudkan kemaslahatan dalam setiap hukum sebagaimana ia bertujuan menghilangkan kemudharatan dan kemafsadatan baik yang bersifat materil maupun maknawi, kini dan mendatang.[15] Dan ada salah satu ayat Al Qur'an yang menyinggung tentang pajak yaitu:

---

[14]Fitri Kurniawati,"*Analisis Komparasi Sistem Perpajakan Indonesia Dengan Sistem Perpajakan Menurut Islam*",Jurnal Infestasi, Vol.8,No.1,2009,Hlm 22-31.

[15]Muhammad Turmudi,"*Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam*",Jurnal AL-'Ad Vol.8,No.1,2015,Hlm129.

QS. At-Taubah [9]:29: قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلۡحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعۡطُواْ ٱلۡجِزۡيَةَ عَن يَدٖ وَهُمۡ صَٰغِرُونَ ٢٩

artinya,"*Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar Jizyah (Pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk (QS.[9]:29).*

2.1.1.3 Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah bagian pajak daerah yang termasuk kedalam jenis pajak provinsi. Objek dari pajak kendaraan bermotor adalah penguasaan kendaraan dan/atau kepemilikan kendaraan bermotor.

a. Kendaraan bermotor adalah semua jenis kendaraan beroda dan gandengannya atau tidak yang digunakan disemua jenis jalan darat maupun yang dioperasikan di air yang digerakkan dengan menggunakan peralatan peralatan teknik (motor ataupun peralatan lain sejenisnya) yang berfungsi sebagai pengubah suatu sumber daya energi energi tertentu sehingga menjadi tenaga yang menghasilkan gerak pada kendaraan bermotor tersebut, temasuk juga alat-alat berat

dan alat-alat besar sejenisnya yang untuk mengoperasikannya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat permanen.

b. Kendaraan bermotor yang dioperasikan di semua jenis jalan di darat beroda beserta gandengannya dan di air dengan ukuran isi kotor lima *Gross Tonnage* (GT 5) sampai dengan tujuh *Gross Tonnage* (GT 7).[16]

2.1.2 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan sikap mengerti wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya terhadap pelaksanaan fungsi untuk mengetahui tujuan kewajiban dalam membayar pajak. Kesadaran untuk mengetahui ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai dan ditaati. Bila seseorang hanya mengetahui berarti kesadaran wajib pajak tersebut masih rendah. Idealnya untuk mewujudkan sadar dan peduli pajak, masyarakat harus terus diajak untuk megetahui, mengakui, menghargai dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan sangatlah penting karena dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak diharapkan wajib pajak dapat memahami dan menyadari tentang

[16]Randy Ilhamsyah, dkk, *Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WajibPajak Kendaraan Bermotor(Studi SAMSAT Kota Malang),* Jurnal Perpajakan JEJAK Vol.8, No.1, 2016, hlm. 9

pentingnya peran perpajakan, tetapi hal tersebut belum dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

2.1.3 Sanksi Pajak

Dalam bahasa Indonesia kata sanksi diambil dari bahasa Belanda sanctie, dalam konteks hukum sanksi yaitu hukuman yang diberikan oleh pengadilan kepada pihak yang terbukti bersalah. Yang dimaksud dari sanksi perpajakan adalah jaminan di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan harus ditaati, dipatuhi atau bisa dikatakan juga sanksi perpajakan merupakan alat (preventif) agar warga negara selalu taat dalam pembayaran pajak.[17]

Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan dalam resmi sanksi pajak terbagi menjadi dua, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administratif merupakan pembayaran kerugian kepada negara yang berupa denda, bunga, dan kenaikan sedangkan sanksi pidana

[17] Mardianto, 2016, *Perpajakan Edisi Terbaru*, Yogyakarta: ANDI, hlm 59-62.

merupakan sanksi yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan perpajakan khususnya dalam ketentuanumum dan tatacara perpajakan.

2.1.4 Modernisasi Administrasi Perpajakan

Sistem administrasi perpajakan modern adalah penerapan sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan. Terdapat beragam inovasi yang diciptakan sebagai pengembangan layanan SAMSAT di Jakarta Selatan, antara lain:

a. Samsat Keliling, merupakan layanan dengan menggunakan kendaraan bermotor yang beroperasi dari satu tempat ke tempat lainnya.
b. Samsat *Drive Thru*, adalah layanan pengesahan surat menyurat dan pembayaran pajak yang memungkinkan wajib pajak melakukan transaksi tanpa harus turun dari kendaraan bermotor yang dikendarainya.
c. *E-Samsat*, merupakan alternatif layanan pengesahan surat menyurat dan pembayaran pajak secara elektronik melalui Channel Bank seperti ATM, *Mobile Banking* dan *Internet Banking*.

d. Samsat *Corner* merupakan layanan pengesahan surat menyurat dan pembayaran pajak di mall, supermarket dan Hypermart.[18]

Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Program ini dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif. Perubahan yang dilakukan diantarannya adalah struktur organisasi, proses bisnis, dan teknologi informasi dan komunikasi serta manajemen sumber daya manusia.[19]

Konsep dari modernisasi perpajakan, adalah pelayanan prima dan pengawasan intensif dengan pelaksanaan good governance. Tujuan modernisasi antara lain, meningkatkan kepatuhan pajak, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan dan memacu produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Modernisasi sendiri meliputi tiga hal, yakni reformasi kebijakan, administrasi dan pengawasan. Keberhasilan modernisasi perpajakan membutuhkan kerja sama dan keterbukaan hati dari kedua belah pihak, baik dari Direktorat Jenderal Pajak maupun wajib pajak.

---

[18]Pradipta, dkk, "*Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak…,* Jurnal MONEX, vol 8, nomor 2, 2019, hlm 33.

[19] Farandy, Muhammad Rafli, 2018."*Pengaruh Sanksi Administrasi,Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor(Studi Kasus Wajib Pajak SAMSAT Purbalingga) Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.*

Program modernisasi administrasi perpajakan telah mendapat peran cukup penting dalam menentukan masa depan Direktorat Jenderal Pajak. Dalam praktiknya, DJP terus melakukan berbagai pembenahan, diantaranya pembenahan organisasi yang kini lebih menyesuaikan pada kebutuhan wajib pajak. Selain itu DJP juga melakukan pembaharuan di bidang informasi teknologi, business redesign process serta sumber daya manusia (SDM). Apabila seluruh aspek modernisasi sudah berjalan dengan baik, maka pihak DJP dapat melakukan penilaian berbasis kinerja kepada para pegawai dan memberikan insentif berdasarkan kinerjanya. Dengan perbandingan yang ada dalam pengelolaan pajak di berbagai negara, utamanya negara-negara yang lebih maju, agar mudah diaplikasikan dan dilaksanakan maka disusun konsep modernisasi perpajakan ala Indonesia, yakni disesuaikan dengan iklim, kondisi, dan sumber daya yang ada. Sebagai dasar dari konsep modernisasi administrasi perpajakan adalah ”pelayanan prima” dan ”pengawasan intensif” dengan pelaksanaan ”good governance”.

Adapun tujuan modernisasi perpajakan adalah untuk menjawab latar belakang dilakukannya modernisasi perpajakan, yaitu:

a. Tercapainya tingkat kepatuhan pajak (tax compliance) yang tinggi.
b. Tercapainya tingkat kepercayaan (trust) terhadap administrasi perpajakan yang tinggi.
c. Tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

Adanya modernisasi administrasi perpajakan ini diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak (tax compliance) dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, serta kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak, seperti tax evasion dan tax avoidance, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara. Pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi tax service dan tax enforcement.

Pengukuran efektivitas administrasi perpajakan yang lebih akurat adalah dengan mengukur berapa besarnya jurang kepatuhan (tax gap), yaitu selisih antara penerimaan yang sesungguhnya dari potensi pajak dengan tingkat kepatuhan dari masing-masing sektor perpajakan. Dengan adanya perbaikan sistem administrasi perpajakan diharapkan akan mendorong kepatuhan wajib pajak Dengan kata lain hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah penerapan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.[20]

[20]Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga, "*Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*", Jurnal Akuntansi Vol.1 No.2, 2009, Hal: 119-138.

2.1.5 Kepatuhan WajibPajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan dalam perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Kepatuhan dapat didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang wajib pajak sesuai atau gagal untuk memenuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan dalam hal perpajakan merupakan suatu kedisiplinan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dibidang perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah keadaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakannya yang sesuai dengan isi undang-undang perpajakan. Kepatuhan material juga meliputi kepatuhan formal.

2.2 PenelitianTerdahulu

Berikut ini ada beberapa penelitian terdahulu yang penulis temukan:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

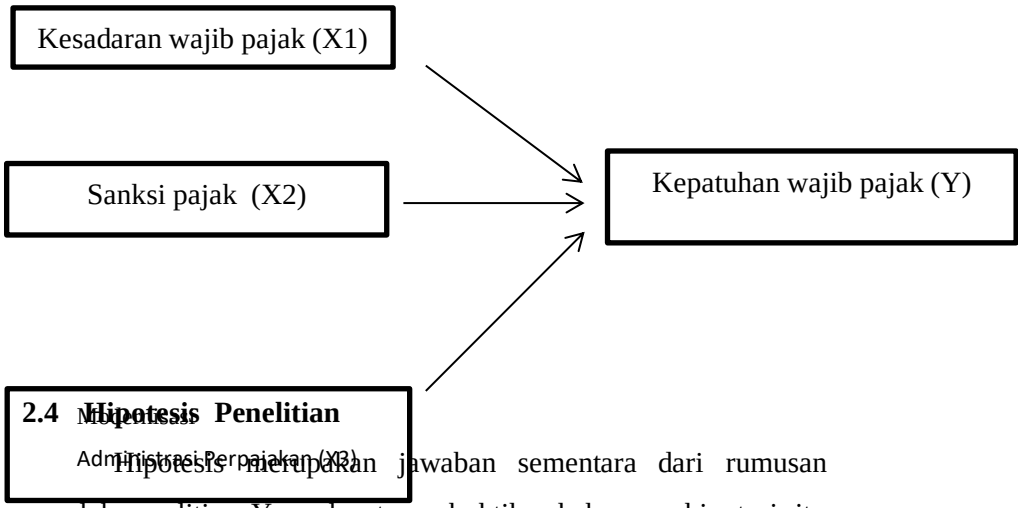
Nama	Judul	Hasil Analisa
Randi Ilhamsyah Maria G Wi Endang Rizky Yudhi Dewantara	Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus SAMSAT Kota Malang)	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat kota malang. Hal ini menunjukan bahwa wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat kota malang sudah memiliki kesadaran yang baik dan Sadar bahwa memahami pajak itu penting
Dewi Kusuma Wardani Rumiyatun	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat	Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

	Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB Roda Empat di Samsat Drive Thru Bantul)	
Ketut Evi Susilawati Ketut Budiartha	Pengaruh Kesadarn Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepayuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor
Mohammad Choirul Anam, Rita Andini, Hartono	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayana Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas Sebagai Variabel	Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh tidak langsunng terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi sanksi yang di berikan tidak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan seorang Wajib Pajak.

	Intervening (Studi di KPP Pratama Salatiga)	
Viva A. A. Kowel, Lintje Kalangi, Steven J. Tangkuman	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Minahasa Selatan	Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin meningkat penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak.
Pradipta Anisa Virgiawati, Samin, Dwi Jaya Kirana	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Wajib Pajak di Samsat Jakarta Selatan)	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritik

Dari tinjauan teori dan beberapa penelitian terdahulu maka didapatkan sebuah kerangka pemikiran dibawah ini:



2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah penelitian. Yang dapat membuktikan kebenaran hipotesis itu adalah dari data yang terkumpul. Secara statistik, hipotesis diartikan sebagai pernyataan mengenai keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dari stempel penelitian.[21] Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka teori maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

Kesadaran wajib pajak merupakan sikap mengerti wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya terhadap

[21]Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 224

pelaksanaan fungsi untuk mengetahui tujuan kewajiban dalam membayar pajak. Kesadaran untuk mengetahui ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai dan ditaati. Bila seseorang hanya mengetahui berarti kesadaran wajib pajak tersebut masih rendah. Idealnya untuk mewujudkan sadar dan peduli pajak, masyarakat harus terus diajak untuk megetahui, mengakui, menghargai dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku. Menurut Randi Ilhamsyah Maria, G Wi Endang Rizky dan Yudhi Dewantara (2016), terdapat dua bentuk kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak sehingga mendorong wajib pajak dalam membayar pajak pertama, kesadaran bahwa pajak adalah suatu bentuk kontribusi warga negara dalam menunjang dan meningkatkan pembangunan negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan dalam pembayaran pajak akan sangat merugikan negara, karena sumber pendapatan dan pembangunan sebuah negara. Jadi Kesadaran wajib pajak masyarakat tinggi maka kesadaran buat membayar pajak juga tinggi dan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.[22]

[22]Randy Ilhamsyah, dkk, *Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WajibPajak Kendaraan Bermotor(Studi SAMSAT Kota Malang),* Jurnal Perpajakan JEJAK Vol.8, No.1, 2016, hlm. 9

H_1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan ditaati, dipatuhi atau bisa dikatakan juga sanksi perpajakan merupakan alat (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat meyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Wajib pajak akan patuh (karena tekanan dan paksaan) adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usaha penyelundupan pajak. Menurut Mohammad Choirul Anam, Rita Andini, Hartono, bahwa semakin tinggi sanksi yang di berikan tidak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan seorang Wajib Pajak. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.[23]

H_2 : Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang

[23]Muhammad Choirul Anam, dkk, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayana Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas Sebagai Variabel Intervening (Studi di KPP Pratama Salatiga),*Journal Of Acounting.

handal dan terkini. Karena semakin mudah dalam membayar pajak maka wajib pajak akan semakin patuh dalam membayar pajak. Menurut Viva A. A. Kowel, Lintje Kalangi, Steven J. Tangkuman (2019), semakin meningkat penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak. Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.[24]

H_3 : Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

[24]Viva A.A, LintjeKalangi, Steven J.Tangkuman. "*Pengaruh Pengetahuan Wajib…".* Jurnal EMBA vol 8. No 3. 2019, hlm. 4251-4260

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Didalam penelitian ini jenis penelitian yang dipakai adalah lapangan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang mendapatkan data-data konkrit dengan cara tejun langsung ke lapangan.[25] Dalam hal ini, peneliti melakukan penelitian langsung ke SAMSAT kota Semarng III.[26]

Penelitian kuantitatif merupakan suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Pemilihan metode kuantitatif memiliki tujuan untuk menguji suatu teori dan hipotesis yang menjabarkan tentang pengaruh antara fenomena sosial yang terjadi. Pengujian tersebut bermkasud untuk mengetahui apakah teori atau hipotesis yang ditetapkan didukung oleh kenyataan atau bukti-bukti empiris atau tidak, jika didukung oleh bukti-bukti yang telah terkumpul maka teori atau hipotesis tersebut dapat diterima ataupun sebaliknya, jika tidak mendukung maka perlu diadakan pengkajian ulang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari beberapa variabel yaitu

[25]Winarno Surahmad, *Dasar dan Teknik Research*, (Bandung: Tarsito, 1999), hlm. 18

[26]Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 37

pengaruh dari Variabel X, yaitu (X_1) *Kesadaran Wajib Pajak*, (X_2) *Sanksi Pajak*, (X_3) *Modernisasi Administrasi Perpajakan*, dan Variabel Y, yaitu (Y) Kepauhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

3.1.2 **Sumber Data Penelitian**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari penyebaran kuesioner kepada wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT kota Semarang III, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur, jurnal atau data-data yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

3.2 **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di SAMSAT kota Semarang III, Jalan Hanoman Raya No. 2, Krapyak, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50146. Lokasi tersebut diambil karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT kota Semarang III.

3.3 **Populasi dan Sampel**

3.3.1 **Populasi**

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.[27] Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bemotor di SAMSAT III Semarang yang berjumlah 83.839 wajib pajak.

3.3.2 **Sampel**

Sampel merupakan beberapa bagian dari jumlah dan karakteristik populasi tersebut. Serta sampel yang diambil dari populasi harus bener-bener representatif atau mewakili.[28] Teknik pengambilan sampel yang digunakan ialah *probability sampling* yaitu *simple random sampling* yaitu dengan pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan karakteristik strata yang ada dalam populasi itu.[29]

Untuk menentukan besarnya sampel pada populasi penelitian ini, dihitung menggunakan rumus Slovin.[30] Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

[27]Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan...*, hlm. 117

[28]Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan...*, hlm. 118.

[29]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,* (Bandung: ALFABETA, 2008)

[30]Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS,* Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 34.

$$n = \frac{83.839}{1+83.839\ x\ 0{,}1^2}$$

n = 99,99 atau dibulatkan menjadi 100

Dimana: *n* = Jumlah sampel minimal

N = Jumlah populasi sampel yaitu wajib pajakkendaraan bermotor di SAMSAT III Semarang berjumlah 83.839 wajib pajak.

e^2 = Persentase kelonggaran ketelitian karena kesalahan pengambilan sampel, sebanyak 10%

dari hasil perhitungan diatas, maka didapatkan sampel yang digunakan sebanyak 100 wajib pajak.

3.4 **Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian metode yang digunakan peneliti adalah metode kuesioner atau angket, merupakan teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan cara memberi sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk diisi sesuai kehendak respoden. Metode ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data yang terkait dengan variabel sebagai berikut:

X_1: Kesadaan Wajib Pajak,

X_2: Sanksi Pajak,

X_3: Modernisasi Administrasi Perpajakan, dan

Y : Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Model kuesioner yang dipakai disini adalah tertutup karena jawaban telah tersedia. Dan diukur menggunakan skala likert, merpakan skala yang dikategorikan menjadi lima tingkat preferensi jawaban.Dengan pilihan jawaban dibaah ini:[31]

1) Sangat Setuju (SS) = 5
2) Setuju (S) = 4
3) Netral (N) = 3
4) Tidak Setuju (TS) = 2
5) Sangat Tidak Setuju (STS) = 1

3.5 **Variabel Penelitian dan Pengukuran**

3.5.1 **Variabel Independen**

Merupakan variabel yang bisa mempengaruhi variabel dependen, yang dapat berpengauh positif

[31]Darmawan, *Metode…* hlm. 169

maupun negatif. Berikut ini adalah beberapa variabel independen:

Tabel 3.1

Variabel Independen

Variabel Independen			
No	**Variabel**	**Definisi Variabel**	**Indikator**
1	Kesadaran Wajib Pajak (X_1)	Suatu tindakan untuk membayar pajak secara sukarela berdasarkan kemauan diri sendiri, tanpa paksaan dan berasal dari hati nurani.	a. Kesadaran membayar pajak secara sukarela. b. Kesadaran akan manfaat pajak. c. Kesadaran bahwa pajak di atur dalam undang- undang.[32]
2	Sanksi Pajak (X_2)	Suatu hukuman bagi wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya yaitu	a. Sanksi Pidana. b. Sanksi Administrasi.[33]

[32]Septiani Ria Yunita, dkk, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Bea Balik Nama, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Wilayah Kabupaten Bayuwangi, E-Journal S1 AK Universitas Pendidikan Ganesha, Vol.8 No.2, 2017.

[33]Septiani Ria Yunita, dkk, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak.....,E-Journal S1 AK Universitas Pendidikan Ganesha, Vol.8 No.2, 2017.

		membayar pajak dan hukuman tersebut sesuai dengan peraturan perundang undangan.	
3	Modernisasi Administrasi Perpajakan (X_3)	Suatu system yang diciptakan bagi wajib pajak biar memudahkan mereka untuk membayar pajak secara efisian dan efektif serta meningkatkan minat membayar pajak karena caranya yang mudah.	a. Efisiensi, b. Kemudahan c. Aksesibilitas d. Efektifitas e. Keakuratan Informasi[34]

3.5.2 **Variabel Dependen**

merupakan variabel yang menjadi pusat penelitian. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh

[34]Pradipta, dkk, "*Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak…,* Jurnal MONEX, vol 8, nomor 2, 2019, hlm 33.

variabel independen. Berikut ini adalah variabel depeden dalam penelitian ini:

Tabel 3.2

Variabel Dependen

Variabel Dependen			
No	**Variabel**	**Definisi Variabel**	**Indikator**
1	Keptuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	Suatu tindakan yang dilakukan untuk membayar pajak tepat waktu dan sesuai dengan tata cara pembayaran yang baik dan benar yang sesuai peraturan undang-undang.	a. Pengisian formulir Spt dengan benar, lengkap dan jelas. b. Melakukan perhitungan denganbenar c. Melakukan pembayaran tepat waktu. d. Tidak pernah menerima teguran.[35]

3.6 **Teknik Pengujian Instrumen Penelitian**

[35] Septiani Ria Yunita, dkk, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak.....,E-Journal S1 AK Universitas Pendidikan Ganesha, Vol.8 No.2, 2017.

Instrumen yang dipakai adalah validitas dan reliabilitas. Instrumen yang valid diartikan alat ukur untuk mendapatkan data yang diukur itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat dipakai untuk mengukur yang akan diukur. Sedangkan instrumen yang reliabel merupakan instrumen yang bila dipakai beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama.[36]

3.6.1 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

a. Uji Validitas

Uji validitas dipakai untuk mengukur valid tidaknya sebuah kuesioner. Sebuah kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan yang ada dalam kuesioner mampu untuk digunakan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Jadi, uji validitas ingin mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang sudah dibuat betul-betul dapat mengukur apa yang hendak diukur.[37] Uji validitas sebaiknya dilakukan pada setiap butir pertanyaan yang diuji validitasnya. Hasil r hitung dibandingkan dengan r tabel, dimana

[36]Sugiyono, *Metode…*, hlm. 121

[37]Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS (Cet IV)*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005, hlm. 45

df= n-2 dengan signifikansi 5%. Jika r tabel<R hitung maka dikatakan valid.[38]

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dapat digunakan untuk mengetahui seberapa hasil pengukuran selalu konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dan dengan cara yang sama juga. Kriteria sebuah instrumen penelitian tersebut dikatakan reliabel dengan menggunakan teknik ini, bila koefisien reliabilitas >0,6.[39]

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apaka data yang diambil dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak.[40] Pada dasarnya uji normalitas adalah membandingkan antara data yang kita miliki dan data berdistribusi normal yang memiliki mean dan standar deviasi yang sama dengan

---

[38] Wiratna dan Poly, *Statistika Untuk Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm.177

[39] Siregar, *Metode Penelitian…,* hlm. 55-57.

[40]Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah (Edisi Pertama),* Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 174.

data kita. Uji normalitas menjadi hal penting karena salah satu syarat pengujian *parametic-test* (uji parametik) adalah data harus memiliki distribusi normal (atau berdistribusi normal).[41]

Berikut dua cara untuk mendeteksi residual data berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan melihat grafik normal probability plot dan uji statistic *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*.[42]

1. Data berdistribusi normal, jika nilai sig (signifikasi) >0,05
2. Data tidak berdistribusi normal, jika nilai sig (signifikasi) <0,05

b. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieaitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Uji ini dilakukan dengan cara melihat koefisien korelasi antar variabel independen. Apabila VIF (*Variance Inflation Factor*) kurang dari 10 dan toleran >0,1 maka tidak terjadi multikolonieritas.[43]

---

[41]Haryadi Sarjono dan Winda Julianita, *SPSS vs Lisrel Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset, Jakarta: Salemba Empat*, 2011, hlm. 53

[42]Hengky Latan dan Selva Temalagi, *Analisis Multivariate Teknik dan Aplikasi menggunakan Program IBM SPSS 20.0,* Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 56

[43]Ghozali, *Aplikasi…*, hlm. 91.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variansi dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Salah satu uji statistik yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan mengguna kan uji Park.[44]

3.6.3 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel(X_1, X_2 dan X_3) secara bersamaan terhadap variabel terikat (Y), dengan menggunakan analisis regresi berganda akan diketahui seberapa besar indeks korelasi ganda dari ketiga variabel bebas terhadap variabel terikat.[45]

3.6.4 Pengujian Hipotesis

a. Uji Pengaruh Parsial (Uji t)

---

[44]Latan dan Temalagi, *Analisis Multivariate…*, hlm. 66

[45]Duwi Priyatno, *Paham Analisa Statistik Data dengan SPSS*, Yogyakarta: MediaKom, 2010, hlm. 61.

Uji t pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui secara individual pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi yang dihasilkan uji t P <0.05, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Cara lain untuk menguji signifikansi uji t adalah dengan membandingkan t statistik dengan t tabel. Jika t statistik>t tabel, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

b. Uji Pengaruh Simultan (Uji f)

Uji F pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dipenden ataukah tidak. Jika nilai signifikansi yang dihasilkan uji f adalah P<0.05, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Cara lain untuk menguji signifikansi uji F adalah dengan membandingkan F statistik dengan F tabel, jika F statistik >Ftabel, maka dapat disimpulkan bahwa

semua variabel independensecara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.[46]

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Pengukuan Koefisien determinan (R^2) pada intinya mengukur kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Angka koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. jumlah R^2 yang kecil dapat diartikan kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen amat terbatas. jumlah yang mendekati satu diartikan variabel independen menjelaskan hampir semua informasi yang diasumsikan untuk memprediksi variabel dependen.[47]

[46]Latan dan Temalagi, *Analisis Multivariate…*, hlm. 56.
[47]Ghazali, *Aplikasi…*, hlm. 177.

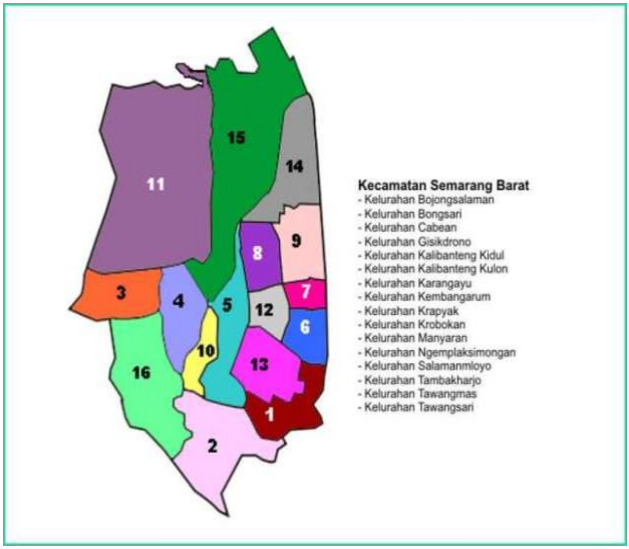
BAB IV
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Lokasi Geografis SAMSAT Semarang III

Letak kantor SAMSAT kota Semarang III yaitu berlokasi di Jalan Hanoman Raya No. 2, Krapyak, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50146. Berikut ini kondisi umum geografis SAMSAT III Semarang :

Gambar peta kecamatan Semarang Barat



- Luas Wilayah : 21,74 km²

- Kepadatan : 8163 jiwa/km²
- Jumlah Keluarahan : 16
- Jumlah Kecamatan : 5[48]

4.1.2 Sejarah Berdirinya SAMSAT

Sejarah berdirinya Samsat usulan yang disampaikan oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam forum "Penataran Para Pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I se Indonesia" yang diselenggarakan di Jakarta dari tanggal 9 s.d. 17 April 1976 oleh Badan Pendidikan dan Latihan Departemen Dalam Negeri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 46 Tahun 1976 tanggal 24 Maret 1976. "Usulan kepada Pemerintah khususnya Pimpinan Departemen Dalam Negeri untuk dapatnya Samsat PKB, BBNKB, SWDKLLJ, dan STNK dijadikan system pemungutan PKB dan BBNKB untuk seluruh Indonesia". maka dikeluarkan persetujuan dari Pemerintah secara terpadu dalam bentuk "Surat Keputusan Bersama" yang dikeluarkan oleh Menhankam, Menkeu, dan Mendagri pada tanggal 28 Desember 1976 No. Pol. Kep. 13/XII/1976, Kep. 1693/MK/IV/12/1976, 311 Tahun 1973. Kemudian untuk penjabaran Surat Keputusan Bersama tersebut dalam pelaksanaannya, disusun

[48]Kantor UPPD SAMSAT semarang III

Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap dalam pengeluaran STNK, Pembayaran PKB/BBNKB, SWDKLLJ yang dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 1977 tanggal 28 Juni 1977 .

4.1.3 Visi dan Misi SAMSAT SEMARANG III

4.1.3.1 Visi lembaga

Terwujudnya pelayanan prima berbasis teknologi informasi menuju pemerintahan yang bersih.

4.1.3.2 Misi lembaga

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat, Meningkatkan Sumber Daya Manusia, Meningkatkan Identifikasi dan Keamanan Kepemilikan Kendaraan Bermotor. Dan Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Pusat.

4.1.4 Motto SAMSAT Semarang III

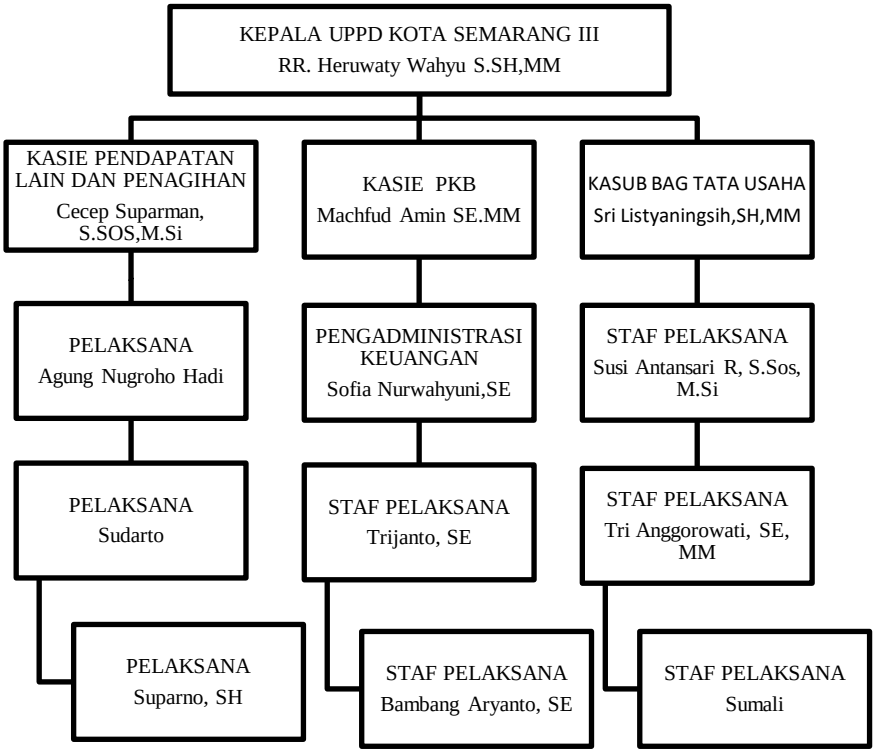
Bersama SAMSAT kita wujudkan pelayanan prima.[49]

4.1.5 Struktur Organisasi SAMSAT Semarang III

Struktur Organisasi SAMSAT kota Semarang III untuk untuk merealisasikan visi dan misi organisasi

[49]SAMSAT Semarang II, "profil", diakses dari *http://dppad.jatengprov.go.id/up3ad-kota-semarang-iii/* , pada 10 april 2020, pukul 20.00 WIB.

diperlukan struktur organisasi yangjelas tupoksinya. Sehingga akan lebih gampang untuk mengawasi dan mengarahkan dalam hal melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan terlebih dahulu dan dapat melaksanakan pelayanan serta penarikan pajak dapan dilaksanakan secara maksimal. Adapun struktur organisasi pada SAMSAT kota Semarang III adalah sebagai berikut :



4.1.6 Layanan-layanan pembayaran pajak di SAMSAT III kota Semarang

Sekarang laju pertumbuhan kendaraan bermotor di Kota Semarang sangat pesat. Hal ini menjadi indikasi besarnya potensi pendapatan pajak kendaraan bermotor di Kota Semarang. Oleh karena itu diperlukan upaya agar penerimaan pajak kendaraan

bermotor dapat dioptimalkan. UP3AD dan Samsat Kota Semarang III dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor melakukan upayaupaya sebagai berikut :

a. Meningkatkan kualitas pelayanan bagi wajib pajak. Peningkatan kualitas pelayanan dilakukan dengan berbagai cara salah satunya dengan melengkapi sarana dan prasarana Kantor UP3AD dan Samsat Kota Semarang III. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan wajib pajak yang hendak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dengan semakin meningkatnya kenyamanan di Kantor UP3AD dan Samsat Kota Semarang III, diharapkan para wajib pajak tidak akan segan untuk datang dan menyelesaikan kewajiban perpajakannya di kantor tersebut.
b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Menusia (pegawai). Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dilakukan dengan menerapkan standardisasi waktu pelayanan. Sehingga para pegawai UP3AD dan Samsat Kota Semarang III, selalu berpedoman dengan standardisasi waktu pelayanan tersebut. Hal ini dilakukan agar proses pelayanan dapat dilakukan secara teliti, tepat dan cepat.
c. Sosialisasi mengenai pembayaran pajak kendaraan bermotor. Sosialisasi dilakukan dengan berbagai media misalnya melalui koran, selebaran, iklan layanan masyarakat, dan lain sebagainya. Sosialisasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban

perpajakannya. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan warga masyarakat tergerak untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

d. Memperluas jaringan pelayanan administrasi pajak kendaraan bermotor. UP3AD dan Samsat Kota Semarang I saat ini tengah berusaha untuk memperluas jaringan pelayanan administrasi pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya program Samsat Online DP Mall dan Samsat Keliling. Program Samsat Online DP mall dan Samsat Keliling ini akan sangat membantu bagi masyarakat yang tempat tinggalnya berjauhan dengan Kantor Induk UP3AD dan Samsat Kota Semarang I. Dengan adanya program ini, maka memudahkan bagi masyarakat yang tidak sempat datang ke kantor UP3AD dan Samsat Kota Semarang III dalam mengurus pemenuhan kewajiban perpajakannya.
e. Penambahan layanan bagi wajib pajak dalam mengurus pajak kendaraan bermotor. UP3AD dan Samsat Kota Semarang III telah malakukan penambahan layanan dalam pembayaran kendaraan bermotor dengan Samsat Drive Thru atau Samsat Cepat. Samsat Drive Thru atau Samsat Cepat merupakan layanan dimana wajib pajak yang akan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tidak perlu turun dari kendaraannya.[50]

[50]hasil wawancara dengan kepala bagian pajak kendaran bermotor Bapak Machfudh Amin, SE, MM, di kantor SAMSAT III Kota Semarang, pada hari kamis 6 Februari 2020 pukul 10.52 WIB.

4.2 Deskriptif Data Penelitian dan Karakteristik Responden

4.2.1 Deskriptif Data penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, data yang dikumpulkan peneliti dilakukan secara langsung dan menggunakan kuesioner kepada responden yang telah dipilih yaitu wajib pajak di SAMSAT III kota Semarang.

Penyebaran kuesioner dilaksanakan dari tanggal 30 maret 2020 hingga 06 april 2020 dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden secara langsung dan tidak langsung melalui google *form* kuesioner. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 responden. Hasil data yang didapatkan kemudian akan diolah dengan menggunakan program analisis SPSS 23.0.

4.2.2 Karakteristik Responden

Data karakteristik responden dipakai untuk menggambarkan kondisi responden sehingga peneliti mudah dalam memahami hasil-hasil penelitian. Karakteristik responden di penelitian ini antara lain nama responden(tidak wajib diisi), jenis kelamin, usia, profesi dan agama.

1. Jenis Kelamin

Tabel 4.1

Karakteristik Responden Berdasarkan

Jenis Kelamin

Jenis_Kelamin					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	77	77.0	77.0	77.0
	Perempuan	23	23.0	23.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Tabel 4.1 menunjukkan objek penelitian berdasarkan jenis kelamin. Dari tabel tersebut menunjukkan responden berjenis kelamin laki-laki berjumlah 77 responden dengan presentase sebesar 77% dan responden perempuan berjumlah 23 responden dengan

persentase sebesar 23%. Dari tabel tersebut jenis kelamin responden terbanyak adalah laki-laki.

2. Usia

Tabel 4.2

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

USIA					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	21-30	57	57.0	57.0	57.0
	31-40	4	4.0	4.0	61.0
	41-50	15	15.0	15.0	76.0
	51-60	21	21.0	21.0	97.0
	61-70	3	3.0	3.0	100.0

	Total	100	100.0	100.0	

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Tabel 4.2 menunjukkan objek penelitian berdasarkan usia. Dari tabel tersebut menunjukkan 57 responden atau 57% berusia 21-30 tahun, 4 responden atau 4% berusia 31-40 tahun, 15 responden atau 15% berusia 41-50 tahun, 21 responden atau 21% berusia 51-60 tahun, 3 responden atau 3% berusia 61-70 tahun. Dari tabel tersebut usia responden terbanyak adalah 21-30 tahun.

3. Pekerjaan

Tabel 4.3

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

PEKERJAAN					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	WIRAUSAHA	18	18.0	18.0	18.0
	PNS	10	10.0	10.0	28.0
	SWASTA	25	25.0	25.0	53.0
	LAINNYA	47	47.0	47.0	100.0

	Total	100	100.0	100.0	

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Tabel 4.3 menunjukkan objek penelitian berdasarkan profesi. Dari tabel tersebut menunjukkan 18 responden atau 18% berprofesi sebagai wirausaha, 10 responden atau 10% berprofesi sebagai PNS, 25 responden atau 25% berprofesi sebagai swasta, 47 responden atau 47% berprofesi lain-lain. Dari tabel tersebut profesi responden terbanyak adalah berprofesi lain-lain selain wirausaha, PNS, dan swasta.

4. Pendidikan

Tabel 4.4

Karakteristik Responden Berdasarkan Agama

PENDIDIKAN					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMP	13	13.0	13.0	13.0
	SMA	43	43.0	43.0	56.0
	D3	4	4.0	4.0	60.0

	S1	37	37.0	37.0	97.0
	S2	3	3.0	3.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Tabel 4.4 menunjukkan objek penelitian berdasarkan Pendidikan. Dari tabel tersebut menunjukkan 12 responden atau 12% berpendidikan SMP, 43 responden atau 43% berpendidikan SMA, dan 37 repsonden atau 37% berpendidikan S1, 3 responden atau 3% berpendidikan S2. Dari tabel tersebut pendidikan responden terbanyak adalah SMA.

4.2.3 Deskripsi Variabel Penelitian

Deskripsi variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan dan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Data-data variabel tersebut diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner, lebih jelasnya bisa dilihat dibawah ini:

4.2.3.1 kesadaran wajib pajak

Dari data hasil penelitian mengenai variabel kesadaran wajib pajak yang diambil dari kuesioner

dengan jumlah pernyataan sebanyak 5 butir instrumen dengan menggunakan skala likert. Adapun nilai hasil kuesioner dapat ditampilkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5

Skor Kuesioner Variabel X_1

Item	SS	%	S	%	N	%	TS	%	STS	%
1	65	65%	32	32%	1	1%	0	0%	2	2%
2	43	43%	37	37%	14	14%	4	4%	2	2%
3	42	42%	42	42%	11	11%	3	3%	2	2%
4	45	45%	43	43%	10	10%	0	0%	2	2%
5	37	37%	51	51%	10	10%	0	0%	2	2%

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Data pada tabel 4.5 diatas menunjukkan tanggapan responden dari variabel kesadaran wajib pajak. Item pernyataan satu dengan indikator kesadaran membayar pajak secara sukarela yaitu membayar pajak kendaraan bermotor karena sadar merupakan kewajiban saya sebagai warga negara yang

baik sebanyak 65 atau 65% responden menjawab sangat setuju,32 atau 32% responden menjawab setuju, 1 responden atau 1% menjawab netral, 0 atau 0% responden menjawab tidak setuju, dan 2 atau 2% responden menjawab sangat tidak setuju.

Item pernyataan kedua dengan indikator kesadaran akan manfaat pajak yaitu Pajak kendaraan bermotor dipergunakan sebagai sumber pendapatan daerah sebanyak 43 atau 43% responden menjawab sangat setuju, 37 atau 37% responden menjawab setuju, 14 responden atau 14% menjawab netral, dan 4 atau 4% responden menjawab tidak setuju, dan 2 atau 2% responden menjawab sangat tidak setuju.

Item pernyataan ketiga dengan indikator kesadaran membayar pajak secara sukarela yaitu membayar Pajak kendaraan bermotor dengan senang hati dan sukarela sesuai kebijakan pajak, sebanyak 42 atau 42% responden menjawab sangat setuju, 42 atau 42% responden menjawab setuju, 11 responden atau 11% menjawab netral, 3 atau 3% responden menjawab tidak setuju, dan 2 atau 2% responden menjawab sangat tidak setuju.

Item pernyataan keempat dengan indikator kesadaran bahwa pajak diatur undang-undang yaitu

sudah memiliki kesadaran terhadap pentingnya membayar Pajak kendaraan bermotor, sehingga saya selalu membayar dengan tepat waktu, sebanyak 45 atau 45% responden menjawab sangat setuju, 43 atau 43% responden menjawab setuju, 10 responden atau 10% menjawab netral, 0 atau 0% responden menjawab tidak setuju, dan 2 atau 2% responden menjawab sangat tidak setuju.

Item pernyataan kelima dengan indikator kesadaran bahwa pajak diatur undang-undang yaitu menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar, sebanyak 37 atau 37% responden menjawab sangat setuju, 51 atau 51% responden menjawab setuju, 10 responden atau 10% menjawab netral, 0 atau 0% responden menjawab tidak setuju, dan 2 atau 2% responden menjawab sangat tidak setuju.

4.2.3.2 Sanksi Pajak

Dari data hasil penelitian mengenai variabel sanksi pajak yang diambil dari kuesioner dengan jumlah pernyataan sebanyak 5 butir instrumen dengan menggunakan skala likert. Adapun nilai hasil kuesioner dapat ditampilkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.6

Skor Kuesioner Variabel X_2

Sumber: data primer yang diolah, 2020

Item	SS	%	S	%	N	%	TS	%	STS	%
1	42	42%	40	40%	13	13%	16	16%	3	3%
2	31	31%	42	42%	22	22%	3	3%	2	2%
3	36	36%	35	35%	24	24%	2	2%	3	3%
4	44	44%	38	38%	13	13%	1	1%	4	4%
5	38	38%	43	43%	13	13%	4	4%	2	2%

Data pada tabel 4.6 diatas menunjukkan tanggapan responden dari variabel sanksi pajak. Item pernyataan satu dengan indikator sanksi administrasi yaitu mendapatkan sanksi administratif berupa denda apabila terlambat melakukan pembayaran Pajak Kendaraaan Bermotor, sebanyak 42 atau 42% responden menjawab sangat setuju, 40 atau 40% responden menjawab setuju, 13 responden atau 13% menjawab netral, 2 atau 2% responden menjawab tidak setuju, dan 3 atau 3% responden menjawab sangat tidak setuju.

Item pernyataan kedua dengan indikator sanksi administrasi yaitu mendapatkan surat teguran dari Samsat apabila memiliki tunggakan pajak,

sebanyak 31 atau 31% responden menjawab sangat setuju, 42 atau 42% responden menjawab setuju, 22 responden atau 22% menjawab netral, 3 atau 3% responden menjawab tidak setuju, dan 2 atau 2% responden menjawab sangat tidak setuju.

Item pernyataan ketiga dengan indikator sanksi pidana yaitu Polisi akan bertindak tegas kepada para pengendara motor yang belum/terlambat membayar Pajak Kendaraan Bermotor, sebanyak 36 atau 36% responden menjawab sangat setuju, 35 atau 35% responden menjawab setuju, 24 responden atau 24% menjawab netral, 2 atau 2% responden menjawab tidak setuju, dan 3 atau 3% responden menjawab sangat tidak setuju.

Item pernyataan keempat dengan indikator sanksi pidana yaitu takut terkena razia polisi apabila saya tidak membayar pajak kendaraan bermotor, sebanyak 44 atau 44% responden menjawab sangat setuju, 38 atau 38% responden menjawab setuju, 13 responden atau 13% menjawab netral, 1 atau 1% responden menjawab tidak setuju, dan 4 atau 4% responden menjawab sangat tidak setuju.

Item pernyataan kelima dengan indikator sanksi administrasi yaitu merasa malu apabila mendapatkan surat teguran karena tidak membayar

pajak kendaraan bermotor, sebanyak 38 atau 38% responden menjawab sangat setuju, 43 atau 43% responden menjawab setuju, 13 responden atau 13% menjawab netral, 4 atau 4% responden menjawab tidak setuju, dan 2 atau 2% responden menjawab sangat tidak setuju.

4.2.3.3 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Dari data hasil penelitian mengenai variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan yang diambil dari kuesioner dengan jumlah pernyataan sebanyak 5 butir instrumen dengan menggunakan skala likert. Adapun nilai hasil kuesioner dapat ditampilkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.7

Skor Kuesioner Variabel X3

Item	SS	%	S	%	N	%	TS	%	STS	%
1	41	41%	50	50%	7	7%	1	1%	1	1%
2	41	41%	37	37%	19	19%	1	1%	2	2%
3	43	43%	39	39%	13	13%	3	3%	2	2%
4	38	38%	44	44%	15	15%	1	1%	2	2%
5	50	50%	32	32%	12	12%	3	3%	3	3%

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Data pada tabel 4.7 diatas menunjukkan tanggapan responden dari variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan. Item pernyataan satu dengan indikator efisiensi yaitu Menjadikan pembayaran pajak lebih nyaman dan fleksibel sejalan dengan aktivitas wajib pajak, sebanyak 41 atau 41% responden menjawab sangat setuju, 50 atau 50% responden menjawab setuju, 7 responden atau 7% menjawab netral, 1 atau 1% responden menjawab tidak setuju, dan 1 atau 1% responden menjawab sangat tidak setuju.

Item pernyataan kedua dengan indikator kemudahan yaitu Tersedianya fasilittas seperti ATM/ Bank Persepsi, Samsat Keliling, Samsat DriveThru, dan Samsat Corner untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor sudah cukup memadai, sebanyak 41 atau 41% responden menjawab sangat setuju, 37 atau 37% responden menjawab setuju, 19 responden atau 19% menjawab netral, 1 atau 1% responden menjawab tidak setuju, dan 2 atau 2% responden menjawab sangat tidak setuju.

Item pernyataan ketiga dengan indikator efektifitas yaitu Penghematan biaya dalam mengurus kewajiban perpajakan kepada wajib pajak, sebanyak 43 atau 43% responden menjawab sangat setuju, 39

atau 39% responden menjawab setuju, 13 responden atau 13% menjawab netral, 3 atau 3% responden menjawab tidak setuju, dan 2 atau 2% responden menjawab sangat tidak setuju.

Item pernyataan keempat dengan indikator keakuratan30rb informasi yaitu menghasilkan informasi yang akurat setiap waktu kepada pihak yang berkepentingan, sebanyak 38 atau 38% responden menjawab sangat setuju, 44 atau 44% responden menjawab setuju, 15 responden atau 15% menjawab netral, 1 atau 1% responden menjawab tidak setuju, dan 2 atau 2% responden menjawab sangat idak setuju.

Item pernyataan kelima dengan indikator aksesibilitas yaitu adanya peningkatan dalam fasislitas pelayanan, sebanyak 50 atau 50% responden menjawab sangat setuju, 32 atau 32% responden menjawab setuju, 12 responden atau 12% menjawab netral, 3 responden atau 3% responden menjawab tidak setuju, dan 3 atau 3% responden menjawab sangat tidak setuju.

4.2.3.4 Kepatuhan Wajib pajak

Dari data hasil penelitian mengenai variabel kepatuhan wajib pajak yang diambil dari kuesioner dengan jumlah pernyataan sebanyak 7 butir instrumen

dengan menggunakan skala likert. Adapun nilai hasil kuesioner dapat ditampilkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.8

Skor Kuesioner Variabel Y

Item	SS	%	S	%	N	%	TS	%	STS	%
1	71	71%	23	23%	4	4%	0	0%	2	2%
2	65	65%	27	27%	6	6%	1	1%	2	2%
3	40	40%	32	32%	25	25%	0	0%	3	3%
4	57	57%	31	31%	10	10%	0	0%	2	2%
5	61	61%	35	35%	2	2%	0	0%	2	2%
6	36	36%	39	38%	18	18%	7	7%	0	0%
7	46	46%	40	40%	12	12%	0	0%	2	2%

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Data pada tabel 4.8 diatas menunjukkan tanggapan responden dari variabel kepatuhan wajib pajak. Item pernyataan satu dengan indikator pengisian formulir Spt dengan benar, lengkap dan jelas yaitu membayar Pajak kendaraan bermotor sesuai ketentuan karena saya sadar bahwa hal tersebut merupakan kewajiban sebagai warga Negara Indonesia, sebanyak 71 atau 71% responden menjawab sangat setuju, 23 atau 23% responden

menjawab setuju, 4 responden atau 4% menjawab netral, 0 atau 0% responden menjawab tidak setuju, dan 2 atau 2% responden menjawab sangat tidak setuju.

Item pernyataan kedua dengan indikator melakukan pembayaran tepat waktu yaitu membayar pajak tepat waktu dan berusaha untuk meminimalisir keterlambatan pembayaran, sebanyak 65 atau 65% responden menjawab sangat setuju, 27 atau 27% responden menjawab setuju, 6 responden atau 6% menjawab netral, 1 responden atau 1% responden menjawab tidak setuju, dan 2 atau 2% responden menjawab sangat tidak setuju.

Item pernyataan ketiga dengan indikator tidak pernah menerima teguran yaitu melaporkan informasi terbaru perihal kepemilikan kendaraan kepada pemerintah, sebanyak 40 atau 40% responden menjawab sangat setuju, 32 atau 32% responden menjawab setuju, 25 responden atau 25% menjawab netral, 0 responden atau 0% responden menjawab tidak setuju, dan 3 atau 3% responden menjawab sangat tidak setuju.

Item pernyataan keempat dengan indikator tidak pernah menerima teguran yaitu membayarkan pajak dengan harapan akan berfungsi untuk kemajuan

daerah, sebanyak 57 atau 57% responden menjawab sangat setuju, 31 atau 31% responden menjawab setuju, 10 responden atau 10% menjawab netral, 0 responden atau 0% responden menjawab tidak setuju, dan 3 atau 3% responden menjawab sangat tidak setuju.

Item pernyataan kelima dengan indikator melakukan perhitungan dengan benar yaitu membayar pajak sesuai dengan yang tertulis di surat kendaraan bermotor, sebanyak 61 atau 61% responden menjawab sangat setuju, 35 atau 35% responden menjawab setuju, 2 responden atau 2% menjawab netral, 0 responden atau 0% responden menjawab tidak setuju, dan 2 atau 2% responden menjawab sangat tidak setuju.

Item pernyataan keenam dengan indikator melakukan pembayaran tepat waktu yaitu membayar pajak sebelum waktu jatuh tempo, sebanyak 36 atau 36% responden menjawab sangat setuju, 39 atau 39% responden menjawab setuju, 18 responden atau 18% menjawab netral, 7 responden atau 7% responden menjawab tidak setuju, dan 0 atau 0% responden menjawab sangat tidak setuju.

Item pernyataan ketujuh dengan indikator melakukan pembayaran tepat waktu yaitu wajib pajak

sebaiknya membayar pajak tepat waktu agar pemasukan daerah lebih efektif, sebanyak 46 atau 46% responden menjawab sangat setuju, 40 atau 40% responden menjawab setuju, 12 responden atau 12% menjawab netral, 0 responden atau 0% responden menjawab tidak setuju, dan 2 atau 2% responden menjawab sangat tidak setuju.

4.3 Uji Instrumen

4.3.1 Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk mengukur valid tidaknya suatu item penyataan. Pada penelitian ini, uji validitas dilakukan dengan bantuan progam SPSS 23.0 dengan taraf signifikansi sebesar 5% atau 0.05. Jika r hitung >r tabel, maka dikatakan valid, sebaliknya jika r hitung<r tabel maka dikatakan tidak valid. Dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan uji signifikansi yang membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel untuk *degree of freedom* (df) = n-2. Dalam hal ini adalah jumlah sampel. Besarnya df = 95-2 atau df = 93 dengan alpha 5% (0.05%) didapat r tabel= 0,2017. Hasil analisis dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.10

Hasil Uji Validitas

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Variabel	Item Pernyataan	R^{tabel}	R^{hitung}	Keterangan
Kesadaran wajib pajak	X1.1	0.1654	0,829	Valid
	X1.2	0.1654	0,781	Valid
	X1.3	0.1654	0,853	Valid
	X1.4	0.1654	0,899	Valid
	X1.5	0.1654	0,840	Valid
Sanksi pajak	X2.1	0.1654	0,753	Valid
	X2.2	0.1654	0,782	Valid
	X2.3	0.1654	0,819	Valid
	X2.4	0.1654	0,788	Valid
	X2.5	0.1654	0,725	Valid
Sistem administrasi perpajakn	X3.1	0.1654	0,812	Valid
	X3.2	0.1654	0,790	Valid
	X3.3	0.1654	0,844	Valid
	X3.4	0.1654	0,882	Valid
	X3.5	0.1654	0,793	Valid
	Y.1	0.1654	0,751	Valid

Kepatuhan wajib pajak	Y.2	0.1654	0,811	Valid
	Y.3	0.1654	0,738	Valid
	Y.4	0.1654	0,820	Valid
	Y.5	0.1654	0,812	Valid
	Y.6	0.1654	0,647	Valid
	Y.7	0.1654	0,833	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.10 diatas, dapat diketahui nilai r hitung bahwa semua skor untuk nilai r hitung keseluruhan indikator yang diujikan bernilai positif dan lebih besar dari r tabel untuk signifikasi alpha 5% dan (df) = 100-2 = 98 dengan uji satu sisi didapat r tabel sebesar 0,1654 yang artinya masing-masing item pernyataan dalam empat variabel X_1, X_2, X_3, dan Y adalah valid.

4.3.2 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji statistik *Crobach Alpha* lebih

dari 0,60(a>0,60). Dalam penelitian ini hasil uji reliabilitas dapat dilihat dalam tabel 4.11.

Tabel 4.11

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	*Reliability Coefficients*	*Cronbach's Alpha*	Keterangan
Kesadaran wajib pajak	5 item	0,891	Reliabel
Sanksi pajak	5 item	0,832	Reliabel
Modernisasi sistem administrasi perpajakan	5 item	0,877	Reliabel
Kepatuhan wajib pajak	7 item	0,883	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.11 di atas dapat diketahui bahwa masing-masing variabel memiliki *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,06(a>0,06), yang artinya bahwa semua variabel X dan Y adalah reliabel.

4.4 Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas ini disajikan dalam dua bentuk cara dalam penelitian ini, yaitu dengan langkah melihat uji *one sample kolmogorov-Smirnov Test* dan grafik normal Probability plot. Berikut disajikan hasil dari *Kolmogrov-Smirnov Test*.

Tabel 4.12

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.07681140
Most Extreme Differences	Absolute	.086
	Positive	.072
	Negative	-.086
Test Statistic		.086

Asymp. Sig. (2-tailed)	.066[c]

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

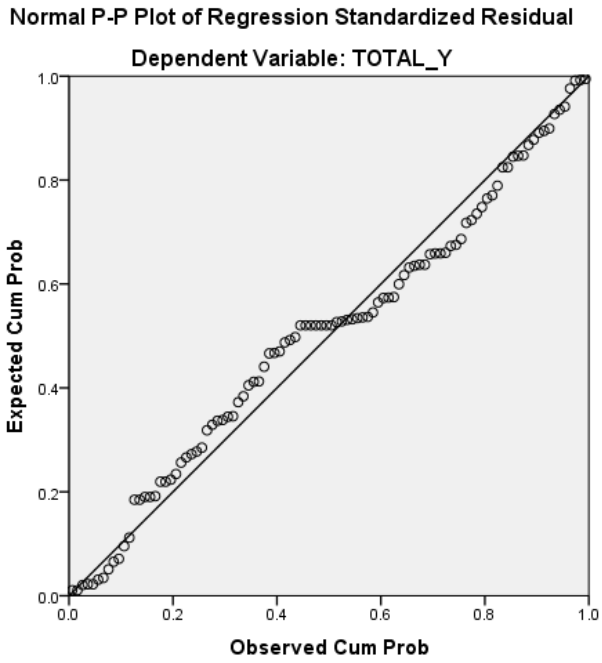
Sumber: Data primer yang diolah,2020

Berdasarkan hasil uji normalitas dalam tabel 4.12 diketahui nilai signifikansi 0,066>0,05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Artinya semua variabel dan data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki distribusi yang normal dan menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena telah memenuhi asumsi normalitas.

Uji normalitas peneltian ini diperkuat dengan grafik normal plot yang dapat dilihat pada gambar 4.3.

Gambar 4.3

Grafik Normal Probability Plot Uji Normalitas



Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Dengan melihat gambar 4.3 dapat diketahui data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

4.4.2 Uji Multikolonieritas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar

variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Ada tidaknya problem multikolinearitas didalam model regresi tersebut dapat dideteksi melalui nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor0*(VIF) dari masing-masing variabel bebas terhadap terikatnya. Suatu model regresi dikatakan terdapat gejala multikolinearitas apabila nilai *tolerance*>0.10 atau sama dengan nilai VIF<10. Berikut ini merupakan hasil uji stastistik dengan SPSS 23.0.

Tabel 4.13

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	4.727	1.446		3.268	.002		
	TOTAL_X1	.926	.093	.719	9.914	.000	.424	2.356
	TOTAL_X2	.020	.079	.017	.260	.796	.541	1.848

TOTAL_X3	.260	.085	.207	3.079	.003	.496	2.016

a. Dependent Variable: TOTAL_Y

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan output tabel 4.13 diatas variabel kesadaran wajib pajak (X_1) memiliki nilai tolerance sebesar 0.429 dan nilai VIF sebesar 2,356. Variabel sanksi pajak (X_2) memiliki nilai tolerance sebesar 0.541 dan nilai VIF sebesar 1,848. Variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan (X_3) memiliki nilai tolerance sebesar 0.496 dan nilai VIF 2.016. Dapat dikatakan semua variabel independen memiliki nilai tolerance>0.10 dan nilai VIF<10. Dengan demikian dapat disimpulkan data dalam penelitian ini tidak mengalami gejala multikolinearitas.

4.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan keengamatan yang lain. Jika varian residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastitistas dan jika berbeda disebut heteroskadastisitas. Model yang baik yaitu yang homoskedastisitas dan tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksi apakah terjadi

heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji *Gletser*. Dibawah ini merupakan tabel hasil uji statistik *Gletser* pada output SPSS 23.0.

Tabel 4.14

Hasil Uji Statistik *Gletser*

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4.320	.927		4.658	.000
TOTAL_X1	-.057	.060	-.142	-.949	.345
TOTAL_X2	-.022	.051	-.057	-.428	.669
TOTAL_X3	-.054	.054	-.137	-.990	.325

a. Dependent Variable: Abs_RES

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Dari keterangan tabel 4.14 diatas dapat diketahui bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X_1)memiliki nilai signifikan sebesar 0.345, variabel sanksi pajak (X_2) memliki nilai signifikan sebesar 0.669, dan variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan (X_3) memiliki nilai signifikan sebesar 0.325. semua variabel independen memiliki nilai0signifikasni diatas 0.05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.5 Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen dan variabel dependen, maka digunakan uji linear berganda dengan persaman regresi sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Variabel dependen (nilai yang diprediksikan)
X = Variabel independen
a = Konstanta
b = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan).

Tabel 4.15
Hasil Uji Analisis Regresi

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4.727	1.446		3.268	.002
TOTAL_X1	.926	.093	.719	9.914	.000
TOTAL_X2	.020	.079	.017	.260	.796
TOTAL_X3	.260	.085	.207	3.079	.003

a. Dependent Variable: TOTAL_Y

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Dari tabel 4.15 diatas dapat diketahui bahwa konstanta sebesar 4.727 artinya ketiga variabel indepeden yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak sebesar 4.727. Koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak (X_1) sebesar 0.926.

Koefisien regresi variabel sanksi pajak (X_2) sebesar 0.020. Koefisien regresi variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan (X_3) sebesar 0.260. Dengan demikian model persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y = 4.727 + 0.926\ X_1 + 0.020\ X_2 + 0.260\ X_3 + e$$

Hasil analisis dengan menggunakan progam SPSS 23.0 maka diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Konstansa (a) bernilai positif sebesar 4.727, hal ini menunjukkan bahwa apabila kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan dianggap konstan, maka besarnya nilai kepatuhan wajib pajak sebesar 4.727.
b. Koefisien regresi X_1 sebesar 0.926 bertanda positif, hal itu menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang searah antara variabel kesadaran wajib pajak (X_1) dengan kepatuhan wajib pajak yang artinya apabila terjadi penambahan satu satuan, maka kepatuhan waji pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0.926 satuan.
c. Koefisien regresi X_2 sebesar 0.020 bertanda positif, hal itu menunjukkan adanya pengaruh yang searah antara variabel sanksi pajak (X_2) dengan kepatuhan wajib pajak yang artinya apabila terjadi penambahan satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0.020 satuan.
d. Koefisien regresi X_3 sebesar 0.260 bertanda positif, hal itu

menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang searah antara variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan (X_3) dengan kepatuhan wajib pajak yang artinya apabila terjadi penambahan satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0.260 satuan.

4.6 Uji Hipotesis

4.6.1 Uji Pengaruh Parsial (Uji t)

Uji parsial (Uji t) digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Adapun hasil olah data untuk uji t adalah sebagai berikut:

Tabel 4.16

Hasil Uji Pengaruh Parsial (Uji t)

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4.727	1.446		3.268	.002

TOTAL_X1	.926	.093	.719	9.914	.000
TOTAL_X2	.020	.079	.017	.260	.796
TOTAL_X3	.260	.085	.207	3.079	.003

a. Dependent Variable: TOTAL_Y

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Uji parsial digunakan untuk menguji atau mengkonfirmasi hipotesis secara individual antara variabel independen X_1, X_2, X_3 secara parsial terkait pengaruh signifikansi terhadap variabel dependen Y . Dasar Pengambilan keputusan untuk hasil uji t didapatkan dari ketentuan berikut, Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa:

a. Uji t variabel kesadaran wajib pajak

   Besarnya nilai t hitung adalah 9.914 lebih besar dari t tabel 1.66023 dan nilai signifikan 0.000 dibawah 0.05 (0.000<0.05), maka dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

b. Uji t variabel sanksi pajak

   Besarnya nilai t hitung 0.260 lebih besar dari t tabel 1.66023 dan nilai signifikansi 0.796 dibawah 0.05 (0.796<0.05), maka dapat disimpulkan bahwa variabel

sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

c. Uji t variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan

Besarnya nilai t hitung 3.079 lebih besar dari t tabel 1.66023 dan nilai signifikan 0.003 diatas 0.05 (0.003>0.05), maka dapat disimpulkan variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.6.2 Uji Pengaruh Simultan (Uji f)

Uji pengaruh simultan dapat digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Lihat pada tabel berikut:

Tabel 4.17

Hasil Uji Simultan (Uji f)

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1563.639	3	521.213	117.181	.000[b]

	Residual	427.001	96	4.448		
	Total	1990.640	99			

a. Dependent Variable: TOTAL_Y

b. Predictors: (Constant), kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan hasil olahan data pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh variabel X_1, X_2 dan X_3 adalah F hitung lebih besar dari F tabel (177.181>3.94) dengan tingkat signifikansi kurang dari 0.05 yaitu 0.000, hal ini memberi simpulan bahwa untuk hasil tersebut diterima yang berarti terdapat pengaruh X_1, X_2 dan X_3 Secara simultan terhadap Y.

4.6.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar nilai presentase kontribusi variabel independen terhadap variabel indepeden. Dari hasil perhitungan melalui progam SPSS 23.0 didapatkan nilai koefisien determinasi sebagai berikut:

Tabel 4.18

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.886[a]	.785	.779	2.109

a. Predictors: (Constant), TOTAL_X3, TOTAL_X2, TOTAL_X1

b. Dependent Variable: TOTAL_Y

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Dari tabel 4.18 diatas diketahui bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 0.785 atau 79%. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dijelaskan kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Sedangkan sisanya 21% dijelaskan oleh faktor yang lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.7 Pembahasan Hasil Analisis Data Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di SAMSAT III Kota Semarang.

4.7.1 Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dari nilai koefisien regresi yang bertanda positif sebesar 0.926, nilai t hitung sebesar 3.268 lebih besar dari t tabel sebesar 1.66023 (3.268>1.66023), dan signifikansi pada 0.000 lebih kecil dari 0.05 (0.000<0.05). Maka hipotesis 1 diterima.

Hasil Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh wajib pajak di dukung oleh Randy Ilhansyah, Maria G Wi Endang, dan Rizky Yudi Dhewantara dengan hasil penelitian bahwa variabel kesadaran wajib pajak yang paling dominan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Kendaraan Bermotor. Didukung juga oleh data responden wajib pajak Hal ini dibuktikan dengan data dari responden di SAMSAT Semarang III yaitu dari 5 item pertanyaan terdapat 1 item pertanyaan pertama yang memiliki skor tertinggi dengan indikator kesadaran membayar pajak secara sukarela yaitu membayar pajak kendaraan bermotor karena sadar merupakan kewajiban saya sebagai warga negara yang baik dengan 65 responden sangat setuju, 35 responden setuju, 1 responden netral, 0 responden tidak setuju, dan 2 responden sangat tidak setuju,

dari skor tersebut SS dikalikan 5, TS dikalikan 4, N dikalikan 3, TS dikalikan 2, STS dikalikan 1 dengan hasil total skor 458. Hasil ini mengisyaratkan kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor yang penting yang menentukan kepatuhan wajib pajak. Variabel ini menjadi dominan karena dalam membayar pajak diperlukan pemahaman perpajakan dan dilakukan dengan benar serta dibayarkan secara sukarela tanpa ada paksaan dan sadar bahwa wajib pajak membayar pajak digunakan untuk biaya negara, sehingga kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.7.2 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak terdapat pengaruh tidak lagsung dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dari nilai koefisien regresi yang sebesar 0.020, nilai t hitung sebesar 0.260 lebih kecil dari t tabel sebesar 1.66023 (0.260<1.66023), dan signifikansi pada 0.796 lebih besar dari 0.05 (0.796<0.05). Maka hipotesis 2 tidak diterima.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Choirul Anam, Rita Andhini, dan Hartono menganai sanksi pajak berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh tidak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak. Didukung juga

oleh data responden wajib pajak Hal ini dibuktikan dengan data dari responden di SAMSAT Semarang III yaitu dari 5 item pertanyaan terdapat 1 item pertanyaan kedua yang memiliki skor terendah dengan indikator sanksi administrasi yaitu mendapatkan surat teguran dari Samsat apabila memiliki tunggakan pajak dengan 31 responden sangat setuju, 42 responden setuju, 22 responden netral, 3 responden tidak setuju, dan 2 responden sangat tidak setuju, dari skor tersebut SS dikalikan 5, TS dikalikan 4, N dikalikan 3, TS dikalikan 2, STS dikalikan 1 dengan hasil total skor 397. Sanksi pajak secara tidak langsung tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, ini terjadi karena sanksi pajak yang ada di Indonesia masih belum tegas, sanksi pajak di Indonesia hanya bersifat denda yg jumlahnya kecil itupun denda dikenakan setelah wajib pajak mengurus pajak kendaraan ke kantor SAMSAT, tanpa adanya sanksi yang tegas missal seperti penyitaan surat kendaraan atau pelarangan kendaraan yg belum membayar pajak untuk tidak boleh dikendarai dijalan raya, maka masyarakat akan menganggap remeh sanksi pajak yang tidak membuat jera. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi sanksi yang di berikan tidak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan seorang Wajib Pajak.

4.7.3 Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dari nilai koefisien regresi yang bertanda positif sebesar 0.0.260, namun nilai t hitung sebesar 3.079 lebih besar dari t tabel 1.66023 (3.079<1.66023), dan signifikansi pada 0.003 lebih kecil dari 0.05 (0.003>0.05). Maka hipotesis 3 diterima.

Variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Pradipta Anisa Virgiawati, Samin, dan Dwi Jaya Kirana menunjykkan hasil bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh yang sigifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Didukung juga oleh data responden wajib pajak Hal ini dibuktikan dengan data dari responden di SAMSAT Semarang III yaitu dari 5 item pertanyaan terdapat 1 item pertanyaan pertama dengan indikator efisiensi yaitu menjadikan pembayaran pajak lebih nyaman dan fleksibel sejalan dengan aktivitas wajib pajak, yang memiliki skor tertinggi dengan 41 responden sangat setuju, 50 responden setuju, 7 responden netral, 1 responden tidak setuju, dan 1 responden sangat tidak setuju, dari skor tersebut SS dikalikan 5, TS dikalikan 4, N dikalikan 3, TS dikalikan 2, STS dikalikan 1 dengan hasil total skor 397. Inovasi SAMSAt harusdisediakan buat kebtuhan wajib

pajak biar lebih maksima dlam peneimaanyang mengutamakan efekifitas dan akuntanbilitas.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari pengaruh variabel kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhasap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak di SAMSAT III Kota Semarang, maka peneliti menarik kesimpulan atas penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaran bermotor, maka H_1 diterima. Hal ini disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.
2. Sanksi pajak tidak berpengaruh signnifikan tehadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, maka H_2 tidak diterima. Hal ini disimpulkan bahwa semakin tinggi atau berat sanksi pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.
3. Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, maka H_3 diterima. Hal ini disimpulkan bahwa semakin tinggi/baik

tingkat modernisasi sistem administrasi perpajakan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil peneitian dan simpulan yang didapat, adapun saran yang diberikan untuk Kantor UPPD dan Samsat Semarang III adalah sebagai berikut:

1. Seharusnya kantor UPPD dan SAMSAT Kota Semarang III harus kerja keras lagi dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak dengan banyak sosialisai dan turun langsung ke masyarakat, dan sanksi pajak bisa diperketat biar wajib pajak tidak menyepelekan, dan modernisasi sitem administrasi perpajakan biar para wajib pajak lebih mudah dalam membayar pajak dan menarik wajib pajak.
2. Banyak wajib pajak yang membayar lima tahun sekaligus atau tidak sama sekali. Hal ini diduga karena kurangnya kesadaran wajib pajak serta tidak dimbangi dengan sanksi perpajakan yang menyebabkan masyarakat menganggap remeh kewajibannya. Selanjutnya, semua itu harus di dukung modernisasi sistem administrasi perpajakan seperti fasilitas membayar pajak, kemudahan,efesiensi, transparasnasi. Ketika semua unsur itu terpenuhi maka para wajib pajak harus mulai membayar pajak dengan sukarela tanpa paksaan dan tepat waktu.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Peneliti kesulitan dalam meminta proses perizinan di Kantor UPPD dan Samsat Semarang III, yang proses perizinannya yang harus melalui Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah (BPPD) terlebih dahulu sebelum melakukan perzinan di Kantor UPPD dan Samsat Semarang III. Sehingga menghabiskan waktu sekitar 1 bulan lebih hanya untuk proses perizinan.

1. Keterbatasan peneliti dalam menemui responden, hal ini disebabkan minimnya wajib pajak yang datang di Kantor UPPD dan Samsat Semarang III sehingga menyebabkan peneliti kesulitan dalam pembagian kuesioner
2. Kesulitan dalam memberikan kuesioner, hal ini dikarenakan ada beberapa responden yang menolak untuk mengisi kuesioner dan merasa takut untuk mengisi kuesioner.

5.4 Agenda Penelitian Yang Akan Datang

Berdasakan keterbatasan yang didapat penulis selama penelitan berlansung, maka untuk penelitian yang akan datang diharapkan untuk :

Menambah variabel yang mungkin mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti motivasi wajib pajak, pendapatan wajib pajak atau menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak serta memperbanyak jumlah responden penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Choirul Anam, Muhammad dkk," *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayana Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas Sebagai Variabel Intervening (Studi di KPP Pratama Salatiga),*Journal Of Acounting.

Darmawan, Deni.2013" *Metode Penelitian Kuantitatif"*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), hlm. 37

Devano dan Rahayu*,2006." Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*", (Jakarta: Kencana, 2006), 112.

Farandy, Muhammad Rafli, 2018."*Pengaruh Sanksi Administrasi,Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor(Studi Kasus Wajib Pajak SAMSAT Purbalingga) Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.*

Ghozali, Imam.2005 " *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS (Cet IV)"*,(Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro) hlm. 45

Gus Fahmi, "*Halal Haram Pajak*", https://www.pajak.go.id/artikel/pajak-haramkah, 11 Februari 2020, 23:54.

Hardiningsih, Pancawati.2011"*Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*", Dinamika Keuangan Dan Perbankan, vol.3 No.1, Hal: 126-142.

Ilhamsyah, Randy dkk,2016 " *Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WajibPajak Kendaraan Bermotor(Studi SAMSAT Kota Malang)",* Jurnal Perpajakan JEJAK Vol.8, No.1(hlm. 9)

Jatmiko, Nugroho.2006 "*Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Wajb Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)",(*Semarang:Universitas Diponegoro).

Kurniawati, Fitri.2009"*Analisis Komparasi Sistem Perpajakan Indonesia Dengan Sistem Perpajakan Menurut Islam*",Jurnal Infestasi, Vol.8,No.1,Hlm 22-31.

Latan, Hengky dan Selva Temalagi,2013 " *Analisis Multivariate Teknik dan Aplikasi menggunakan Program IBM SPSS 20.0"(* Bandung: Alfabeta), hlm. 56

Mardianto, 2016," *Perpajakan Edisi Terbaru"* Yogyakarta: ANDI (hlm 59-62).

Mardiasmo*, 2011."Perpajakan Edisi Revisi 2011*"(Yogyakarta: CV Andi Offet), 59.

Noor, Juliansyah.2012 " *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah (Edisi Pertama)*", Jakarta: Kencana, hlm. 174.

Priyatno, Duwi.2010 " *Paham Analisa Statistik Data dengan SPS"S,(* Yogyakarta: MediaKom), hlm. 61.

Ria Yunita, Septiani dkk, 2017 "*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Bea Balik Nama, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Wilayah Kabupaten Bayuwang"*, E-Journal S1 AK Universitas Pendidikan Ganesha, Vol.8 No.2

Rukajat, Ajat .2018 "*Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach Cet.1*" (Yogyakarta: Deepublish), hlm. 16

Sarjono, Haryadi dan Winda Julianita,2011 " *SPSS vs Lisrel Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset",(Jakarta: Salemba Empat*),hlm. 53.

Siahaan, Marihat Pahala.2013" *Edisi Revisi Pajak Daerah & Retribusi Daerah" (Jakarta: Raja Grafinda Persada).*

Siregar, Syofian.2017" *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS,"* (Jakarta: Kencana) hlm. 34.

Sugiyono,2008 "*Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*" Bandung: Alfabeta,(hlm. 224)

Sugiyono,2008" *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D"* (Bandung: ALFABETA)

Surahmad, Winarno.1999." *Dasar dan Teknik Researc"* (Bandung: Tarsito, 1999), hlm. 18

Thomas Sumarsan,2010, "*Perpajakan Indonesia"*, Jakarta:PT.Indeks

Turmudi, Muhammad.2015"*Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam*",Jurnal AL-'Ad Vol.8,No.1,(Hlm129)

Viva A.A, dkk. 2019 "*Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesdaran Wajib Pajak Dan Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Minahasa Selatan".* Jurnal EMBA vol 8. No 3. 2019, hlm 4251-4260

Wiratna dan Poly,2012 " *Statistika Untuk Penelitian*"(Yogyakarta: Graha Ilmu), hlm.177.

LAMPIRAN

Identitas Responden

NO	UMUR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN TERAKHIR	JENIS PEKERJAAN
1	52	LAKI - LAKI	SMA	WIRAUSAHA
2	21	LAKI - LAKI	D3	LAINNYA
3	51	PEREMPUAN	S1	SWASTA
4	52	LAKI - LAKI	SMP	SWASTA
5	23	LAKI - LAKI	SMA	LAINNYA
6	49	LAKI - LAKI	SMP	WIRAUSAHA
7	52	LAKI - LAKI	SMP	SWASTA
8	45	LAKI - LAKI	SMP	WIRAUSAHA
9	52	LAKI - LAKI	S1	WIRAUSAHA
10	23	PEREMPUAN	S1	LAINNYA
11	23	LAKI - LAKI	S1	LAINNYA
12	57	LAKI - LAKI	SMP	WIRAUSAHA
13	56	LAKI - LAKI	SMP	LAINNYA
14	23	LAKI - LAKI	S1	SWASTA
15	47	LAKI - LAKI	SMP	WIRAUSAHA
16	21	LAKI - LAKI	SMA	LAINNYA
17	43	LAKI - LAKI	SMA	SWASTA
18	45	LAKI - LAKI	SMP	SWASTA
19	50	LAKI - LAKI	S1	PNS
20	58	LAKI - LAKI	S1	PNS

21	51	LAKI - LAKI	S1	PNS
22	49	LAKI - LAKI	SMA	WIRAUSAHA
23	54	LAKI - LAKI	SMA	SWASTA
24	50	LAKI - LAKI	SMA	LAINNYA
25	49	PEREMPUAN	SMA	SWASTA
26	45	LAKI - LAKI	SMA	SWASTA
27	51	LAKI - LAKI	SMA	SWASTA
28	56	LAKI - LAKI	SMA	WIRAUSAHA
29	53	LAKI - LAKI	SMA	WIRAUSAHA
30	24	LAKI - LAKI	S1	LAINNYA
31	20	PEREMPUAN	S1	LAINNYA
32	35	LAKI - LAKI	SMA	SWASTA
33	23	LAKI - LAKI	SMA	LAINNYA
34	21	LAKI - LAKI	D3	LAINNYA
35	24	LAKI - LAKI	S2	LAINNYA
36	60	LAKI - LAKI	SMP	SWASTA
37	24	LAKI - LAKI	SMA	LAINNYA
38	61	LAKI - LAKI	SMP	WIRAUSAHA
39	58	LAKI - LAKI	SMA	LAINNYA
40	32	LAKI - LAKI	SMA	SWASTA
41	31	LAKI - LAKI	S1	LAINNYA
42	23	LAKI - LAKI	S1	LAINNYA
43	24	LAKI - LAKI	S1	SWASTA
44	43	LAKI - LAKI	S1	PNS

45	22	PEREMPUAN	SMA	LAINNYA
46	54	LAKI - LAKI	SMP	WIRAUSAHA
47	30	LAKI - LAKI	S1	PNS
48	23	LAKI - LAKI	SMA	SWASTA
49	22	LAKI - LAKI	SMA	LAINNYA
50	20	LAKI - LAKI	SMA	LAINNYA
51	51	LAKI - LAKI	SMA	SWASTA
52	22	PEREMPUAN	SMA	LAINNYA
53	23	PEREMPUAN	S1	LAINNYA
54	22	PEREMPUAN	S1	LAINNYA
55	23	LAKI - LAKI	S1	WIRAUSAHA
56	23	LAKI - LAKI	S1	SWASTA
57	25	LAKI - LAKI	S1	WIRAUSAHA
58	22	PEREMPUAN	SMA	LAINNYA
59	60	LAKI - LAKI	SMA	PNS
60	23	LAKI - LAKI	SMA	LAINNYA
61	22	PEREMPUAN	S1	LAINNYA
62	23	PEREMPUAN	S1	SWASTA
63	38	PEREMPUAN	SMA	LAINNYA
64	22	LAKI - LAKI	S1	LAINNYA
65	26	LAKI - LAKI	S1	LAINNYA
66	45	PEREMPUAN	S2	LAINNYA
67	28	LAKI - LAKI	S1	SWASTA

68	22	LAKI - LAKI	SMA	LAINNYA
69	45	PEREMPUAN	SMP	SWASTA
70	23	PEREMPUAN	S1	WIRAUSAHA
71	21	LAKI - LAKI	SMA	LAINNYA
72	23	LAKI - LAKI	S1	LAINNYA
73	54	LAKI - LAKI	SMP	LAINNYA
74	23	PEREMPUAN	S1	SWASTA
75	21	PEREMPUAN	SMA	LAINNYA
76	52	LAKI - LAKI	SMA	WIRAUSAHA
77	21	PEREMPUAN	SMA	LAINNYA
78	24	LAKI - LAKI	SMA	LAINNYA
79	23	LAKI - LAKI	SMA	SWASTA
80	50	LAKI - LAKI	S2	PNS
81	22	LAKI - LAKI	SMA	LAINNYA
82	22	PEREMPUAN	S1	SWASTA
83	23	LAKI - LAKI	S1	LAINNYA
84	24	LAKI - LAKI	S1	WIRAUSAHA
85	22	LAKI - LAKI	SMA	LAINNYA
86	23	LAKI - LAKI	SMA	LAINNYA
87	23	LAKI - LAKI	SMA	WIRAUSAHA
88	62	LAKI - LAKI	D3	SWASTA
89	22	PEREMPUAN	SMA	LAINNYA
90	56	LAKI - LAKI	S1	PNS
91	22	PEREMPUAN	S1	LAINNYA
92	28	LAKI - LAKI	S1	PNS
93	22	LAKI - LAKI	SMA	LAINNYA
94	31	LAKI - LAKI	S1	LAINNYA

95	24	LAKI - LAKI	S1	SWASTA
96	22	PEREMPUAN	SMA	LAINNYA
97	21	LAKI - LAKI	SMA	LAINNYA
98	50	PEREMPUAN	D3	LAINNYA
99	64	LAKI - LAKI	SMA	PNS
100	26	LAKI - LAKI	S1	WIRAUSAHA

Data Tabulasi

VARIABEL KESADARAN

No	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	JUMLAH	X2.1
1	5	5	5	5	5	25	5
2	4	5	4	4	4	21	3
3	5	5	5	5	3	23	5
4	4	4	4	4	3	19	5
5	5	4	5	4	3	21	5
6	4	4	4	4	3	19	4
7	5	4	4	3	3	19	4
8	5	4	4	5	3	21	3
9	5	4	5	5	5	24	5
10	4	4	4	5	4	21	4
11	5	5	5	5	4	24	4
12	4	3	3	4	3	17	3
13	4	4	4	4	4	20	4
14	4	5	3	5	4	21	3
15	4	5	5	4	4	22	4
16	5	3	5	5	5	23	5
17	5	5	4	5	5	24	5
18	5	4	2	4	4	19	4
19	4	5	4	4	3	20	4
20	5	3	5	5	4	22	5
21	4	4	4	3	4	19	3

22	5	4	5	4	5	23	4	
23	5	5	5	5	5	25	5	
24	5	5	5	4	4	23	5	
25	5	4	4	5	5	23	5	
26	5	4	4	4	4	21	4	
27	5	5	5	5	5	25	5	
28	4	2	2	3	4	15	4	
29	4	4	4	4	4	20	4	
30	4	5	5	4	4	22	4	
31	5	5	5	5	5	25	5	
32	5	5	5	5	5	25	5	
33	5	5	5	5	5	25	5	
34	4	4	4	4	4	20	3	
35	5	5	5	5	4	24	1	
36	4	4	3	4	4	19	4	
37	5	3	3	3	3	17	3	
38	4	4	3	4	4	19	5	
39	5	5	5	5	5	25	5	
40	5	3	3	4	4	19	4	
41	5	5	4	4	4	22	5	
42	5	3	5	5	5	23	4	
43	1	1	1	1	1	5	1	
44	5	4	4	5	5	23	5	
45	5	5	5	5	5	25	5	
46	4	4	4	4	4	20	4	

47	5	5	5	5	5	25	5	
48	4	5	4	4	4	21	4	
49	5	5	4	4	5	23	3	
50	4	4	3	3	4	18	3	
51	5	4	5	5	4	23	4	
52	5	5	5	4	4	23	4	
53	5	4	4	5	4	22	5	
54	5	4	4	4	4	21	4	
55	5	4	4	4	4	21	5	
56	5	4	4	4	4	21	4	
57	5	3	3	3	3	17	1	
58	5	5	4	5	4	23	4	
59	5	5	5	5	5	25	5	
60	4	4	4	5	5	22	5	
61	4	4	4	4	4	20	4	
62	5	5	5	4	4	23	4	
63	5	5	5	5	5	25	5	
64	4	4	2	3	4	17	4	
65	4	3	4	3	4	18	5	
66	5	5	5	5	5	25	5	
67	5	5	5	5	5	25	5	
68	3	3	4	4	4	18	4	
69	5	3	5	5	4	22	4	

70	5	5	3	5	5	23	5	
71	5	3	4	4	4	20	4	
72	5	5	5	5	5	25	5	
73	5	5	5	5	5	25	5	
74	5	2	5	5	5	22	4	
75	5	4	4	4	4	21	4	
76	5	4	5	4	5	23	3	
77	5	4	4	4	4	21	4	
78	5	5	5	5	5	25	5	
79	4	4	3	4	4	19	4	
80	5	5	5	5	5	25	5	
81	4	4	4	4	4	20	4	
82	5	4	5	5	5	24	5	
83	4	3	4	4	4	19	3	
84	4	5	4	4	4	21	4	
85	5	5	5	5	5	25	5	
86	4	2	4	3	4	17	4	
87	4	4	3	4	4	19	3	
88	5	5	5	5	5	25	5	
89	5	5	5	5	5	25	5	
90	4	2	4	4	4	18	2	
91	5	3	4	4	4	20	4	
92	5	5	5	5	5	25	3	
93	5	5	5	5	5	25	5	
94	5	5	4	4	4	22	5	
95	1	1	1	1	1	5	2	
96	4	3	4	4	4	19	4	

97	5	5	4	5	5	24	5	
98	4	4	3	3	4	18	3	
99	5	5	5	5	5	25	4	
100	4	4	4	4	4	20	4	

UJI VALIDITAS

Correlations

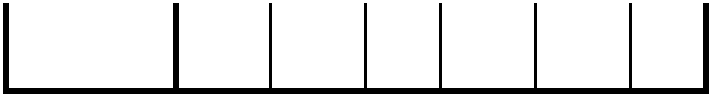
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	TOTAL_X1
Pearson Correlation	1	.529**	.654**	.709**	.651**	.829**
Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
N	100	100	100	100	100	100
Pearson Correlation	.529**	1	.547**	.603**	.530**	.781**
Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
N	100	100	100	100	100	100
Pearson Correlation	.654**	.547**	1	.731**	.632**	.853**
Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
N	100	100	100	100	100	100
Pearson Correlation	.709**	.603**	.731**	1	.750**	.899**
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
N	100	100	100	100	100	100

Pearson Correlation	.651**	.530**	.632**	.750**	1	.840**
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
N	100	100	100	100	100	100
Pearson Correlation	.829**	.781**	.853**	.899**	.840**	1
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
N	100	100	100	100	100	100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	TOTAL_X2
Pearson Correlation	1	.567**	.506**	.435**	.411**	.753**
Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
N	100	100	100	100	100	100
Pearson Correlation	.567**	1	.657**	.436**	.378**	.782**
Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
N	100	100	100	100	100	100
Pearson Correlation	.506**	.657**	1	.564**	.429**	.819**
Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
N	100	100	100	100	100	100
Pearson Correlation	.435**	.436**	.564**	1	.596**	.788**
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
N	100	100	100	100	100	100
Pearson Correlation	.411**	.378**	.429**	.596**	1	.725**
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
N	100	100	100	100	100	100
Pearson Correlation	.753**	.782**	.819**	.788**	.725**	1
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
N	100	100	100	100	100	100



**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5
X3.1	Pearson Correlation	1	.576**	.713**	.618**	.5
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.
	N	100	100	100	100	
X3.2	Pearson Correlation	.576**	1	.597**	.613**	.4
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.
	N	100	100	100	100	
X3.3	Pearson Correlation	.713**	.597**	1	.675**	.5
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.
	N	100	100	100	100	
X3.4	Pearson Correlation	.618**	.613**	.675**	1	.7
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.
	N	100	100	100	100	
X3.5	Pearson Correlation	.511**	.463**	.510**	.721**	
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	
TOTAL_X3	Pearson Correlation	.812**	.790**	.844**	.882**	.7
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.
	N	100	100	100	100	

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4
Y.1	Pearson Correlation	1	.679**	.438**	.573**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100
Y.2	Pearson Correlation	.679**	1	.485**	.547**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100
Y.3	Pearson Correlation	.438**	.485**	1	.613**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100
Y.4	Pearson Correlation	.573**	.547**	.613**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100
Y.5	Pearson Correlation	.601**	.663**	.572**	.611**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100
Y.6	Pearson Correlation	.285**	.469**	.335**	.413**
	Sig. (2-tailed)	.004	.000	.001	.000
	N	100	100	100	100
Y.7	Pearson Correlation	.563**	.576**	.477**	.679**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100
TOTAL_Y	Pearson Correlation	.751**	.811**	.738**	.820**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

UJI RELIABILITAS

X1

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.891	5

X2

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.832	5

X3

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.877	5

Y

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.883	7

UJI NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

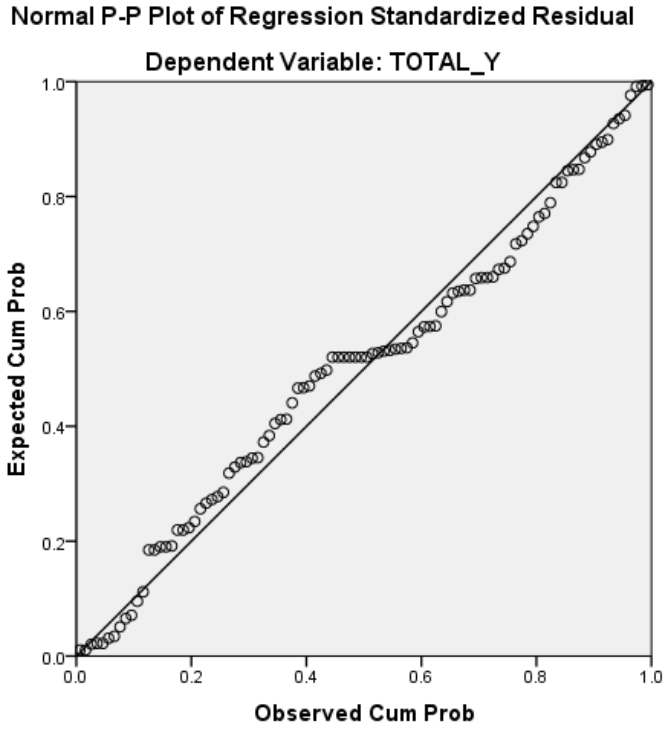
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.07681140
Most Extreme Differences	Absolute	.086
	Positive	.072
	Negative	-.086
Test Statistic		.086
Asymp. Sig. (2-tailed)		.066[c]

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

PROPABILLITY PLOT



UJI MULTIKOLONIERITAS

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.727	1.446		3.268	.
	TOTAL_X1	.926	.093	.719	9.914	.
	TOTAL_X2	.020	.079	.017	.260	.
	TOTAL_X3	.260	.085	.207	3.079	.

a. Dependent Variable: TOTAL_Y

UJI HETEROSKEDASTISITAS

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.320	.927		4.658	.000
	TOTAL_X1	-.057	.060	-.142	-.949	.345
	TOTAL_X2	-.022	.051	-.057	-.428	.669
	TOTAL_X3	-.054	.054	-.137	-.990	.325

a. Dependent Variable: Abs_RES

UJI LINIER BERGANDA

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.727	1.446		3.268	.002
	TOTAL_X1	.926	.093	.719	9.914	.000
	TOTAL_X2	.020	.079	.017	.260	.796
	TOTAL_X3	.260	.085	.207	3.079	.003

a. Dependent Variable: TOTAL_Y

Uji t

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.727	1.446		3.268	.002
	TOTAL_X1	.926	.093	.719	9.914	.000
	TOTAL_X2	.020	.079	.017	.260	.796
	TOTAL_X3	.260	.085	.207	3.079	.003

a. Dependent Variable: TOTAL_Y

UJI f

ANOVA[a]

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.

1	Regression	1563.639	3	521.213	117.181	.000[b]
	Residual	427.001	96	4.448		
	Total	1990.640	99			

a. Dependent Variable: TOTAL_Y

b. Predictors: (Constant), TOTAL_X3, TOTAL_X2, TOTAL_X1

UJI R

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.886[a]	.785	.779	2.109

a. Predictors: (Constant), TOTAL_X3, TOTAL_X2, TOTAL_X1

b. Dependent Variable: TOTAL_Y

KUESIONER PENELITIAN

KUESIONER

Lampiran 02

Data Identitas Responden :

1. Nama :.....
2. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan ***)**
3. Usia : < 30 Tahun / 30-50 Tahun / > 50 Tahun ***)**
4. Pekerjaan : PNS / Karyawan / Swasta / Wiraswasta / Lainnya ***)**

Ket : *) coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Kuesioner :

1. Isilah pertanyaan pada kuesioner ini dan mohon jangan ada yang terlewatkan.
2. Berilah tanda ***check list*** **(√)** pada kolom dimasing-masing pertanyaan/pernyataan dibawah ini sesuai dengan pilihan anda

Pilihan Jawaban :

Keterangan	Notasi	Skor
Sangat Tidak Setuju	STS	1
Tidak Setuju	TS	2
Netral	N	3
Setuju	S	4
Sangat Setuju	SS	5

1. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

NO	Item Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Saya membayar Pajak kendaraan bermotor sesuai ketentuan karena saya sadar bahwa hal tersebut merupakan kewajiban sebagai warga Negara Indonesia.					
2	Saya membayar pajak tepat waktu dan berusaha untuk meminimalisir keterlambatan pembayaran.					
3	Saya melaporkan informasi terbaru perihal kepemilikan kendaraan kepada pemerintah.					

4	Saya membayarkan pajak dengan harapan akan berfungsi untuk kemajuan daerah.					
5	Saya membayar pajak sesuai dengan yang tertulis di surat kendaraan bermotor.					
6	Saya membayar pajak sebelum waktu jatuh tempo.					
7	Wajib pajak sebaiknya membayar pajak tepat waktu agar pemasukan daerah lebih efektif.					

2. Kesadaran Wajib Pajak (X1)

NO	Item Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Saya membayar pajak kendaraan bermotor karena sadar merupakan kewajiban saya sebagai warga negara yang baik.					
2	Pajak kendaraan bermotor dipergunakan sebagai sumber pendapatan daerah.					

3	Saya membayar Pajak kendaraan bermotor dengan senang hati dan sukarela sesuai kebijakan pajak.					
4	Saya sudah memiliki kesadaran terhadap pentingnya membayar Pajak kendaraan bermotor, sehingga saya selalu membayar dengan tepat waktu.					
5	Saya menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar.					

3. Sanksi Pajak (X2)

NO	Item Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Saya akan mendapatkan sanksi administratif berupa denda apabila terlambat melakukan pembayaran Pajak Kendaraaan Bermotor.					
2	Saya akan mendapatkan surat teguran dari Samsat apabila memiliki tunggakan pajak.					
3	Polisi akan bertindak tegas kepada para pengendara motor yang					

	belum/terlambat membayar Pajak Kendaraan Bermotor.					
4	Saya takut terkena razia polisi apabila saya tidak membayar Pajak Kendaraan Bermotor.					
5	Saya merasa malu apabila mendapatkan surat teguran karena tidak membayar Pajak Kendaraan Bermotor.					

4. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X3)

NO	Item Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Menjadikan pembayaran pajak lebih nyaman dan fleksibel sejalan dengan aktivitas wajib pajak.					
2	Tersedianya fasilittas seperti ATM/ Bank Persepsi, Samsat Keliling, Samsat Drive Thru, dan Samsat Corner untuk					

	pembayaran pajak kendaraan bermotor sudah cukup memadai.					
3	Penghematan biaya dalam mengurus kewajiban perpajakan kepada wajib pajak.					
4	Menghasilkan informasi yang akurat setiap waktu kepada pihak yang berkepentingan.					
5	Adanya peningkatan dalam fasislitas pelayanan.					

DOKUMENTASI









DAFTAR RIWAYAT HIDUP MAHASISWA

Nama	: Muhammad Faishal Maula
NIM	: 1505026096
Semester	: 10
Jurusan/Prodi	: S1 Ekonomi Islam
Tempat/Tgl. Lahir	: Jepara, 27 Juni 1997
No. Telepon/HP	: 085702298474
Email	: maulafaishal@gmail.com
Facebook/Twitter	: faishalmaula
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Alamat	: Mantingan RT01/RW01, Tahunan, Jepara
Tinggi/Berat Badan	: 172 Cm. / 70 Kg.
Golongan Darah	: B
Riwayat Penyakit	: -
Status	: Mahasiswa
Jenjang Pendidikan	
1. SD/MI	: SDN Mantingan 01 / Lulus Tahun 2009
2. SMP/MTs	: SMPN 05 Jepara / Lulus Tahun 2012
3. SMA/MA	: SMAN 01 Tahunan / Lulus Tahun 2015

Semarang, 19 Mei 2020

Muhammad Faishal Maula

1505026096